

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK BANSOS
(E-BANSOS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN
SOSIAL DI DINAS SOSIAL BANYUWANGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:
M. ABDUL AZIZ
222105030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK BANSOS
(E-BANSOS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN
SOSIAL DI DINAS SOSIAL BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
M. ABDUL AZIZ
222105030013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2026**

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK BANSOS
(E-BANSOS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN
SOSIAL DI DINAS SOSIAL BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

M. ABDUL AZIZ

222105030013

Disetujui,
Dosen Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dr. HERSA FARIDA QORIANI, M.E.I.

NIP. 198611292018012001

**ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM ELEKTRONIK BANSOS
(E-BANSOS) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PENYALURAN DANA BANTUAN
SOSIAL DI DINAS SOSIAL BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 26 Februari 2026

Tim Penguji

Ketua


ANA PRATIWI, M.S.A.
NIP. 198809232019032003

Sekretaris


MUTMAINNAH, SE., M.E
NIP. 199506302022032004

Anggota:

1. Prof. Dr. H. UBAIDILLAH, M.Ag.
2. Dr. HERSA FARIDA QORIANI, M.E.I




Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Prof. Dr. H. UBAIDILLAH, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

Motto

الْجَنَّةَ عَلَيْهِ اللَّهُ حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ، غَاشٌّ وَهُوَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةٌ، اللَّهُ يَسْتَرْعِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَا

(مسلم رواه)

Artinya: Tidaklah seorang pemimpin yang diberi amanah lalu meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.”

(HR. Muslim)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Sahih Muslim, Kitab Al-Imarah: Bab Tahrim Al-Ghishsh Li Al-Ra 'Iyyah* (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.).

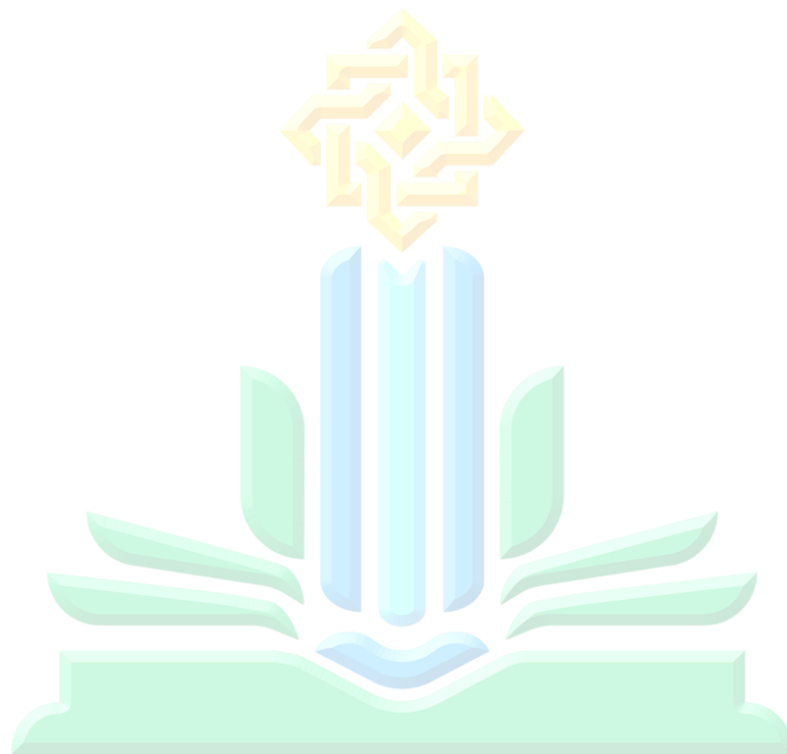
PERSEMBAHAN

Puji Syukur terhadap Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan rasa syukur yang tak terhingga telah menghadirkan orang – orang terbaik dalam memberikan dukungan dan mendo'akan pada proses mengerjakan skripsi ini. Dengan ini skripsi saya persembahkan untuk:

1. Bapak Pandiyo dan Ibu Husnul Hotimah yakni kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, mendoakan, dan memberikan pembelajaran dalam masa yang akan datang. Saya sangat bangga dengan beliau meskipun belum merasakan bangku perkuliahan, beliau tetap memprioritaskan pendidikan demi masa depan untuk ketiga anaknya. Semoga dengan penyelesaian ini dapat membahagiakan dan membanggakan beliau.
2. Segenap Teman - Teman Alumni PP. Miftachussa'adah yang selalu mensupport saya baik senang maupun susah.
3. Segenap teman - teman Himmah yang selalu ada ketika saya butuh bantuan.
4. Teman - teman seperjuangan kelas Akuntansi Syariah terutama Kelas Akuntansi Syariah 3 menempuh pendidikan perkuliahan mulai dari awal hingga pada tahap penyelesaian penulisan skripsi.
5. Dan segenap almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua bagi yang tidak tertulis dilembar ini dan semoga skripsi ini memberikan manfaat hingga pada masa yang akan datang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

M. Abdul Aziz, Hersa Farida Qoriani, 2026: *Analisis Implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) dan Implikasinya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi*.

Kata kunci: Implementasi, E-Bansos, Transparansi, Akuntabilitas, Bantuan Sosial.

Sistem penyaluran bantuan sosial saat ini mengalami perkembangan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem elektronik. Penerapan Sistem E-Bansos merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketertiban administrasi dan tata kelola penyaluran dana bantuan sosial. Implementasi sistem ini menuntut adanya pengelolaan data yang terintegrasi, proses verifikasi yang sistematis, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas di tingkat daerah, khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Sistem E - Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap transparansi penyaluran dana bantuan sosial? 3) Bagaimana implikasi implementasi Sistem E - Bansos terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis implementasi Sistem E-Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. 2) untuk menganalisis implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap transparansi penyaluran dana bantuan sosial. 3) untuk menganalisis implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menelaah proses implementasi sistem serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui penggunaan aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Implementasi sistem tersebut memberikan implikasi terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial karena informasi mengenai status penerima manfaat, program bantuan, serta data pelayanan tersimpan dalam sistem digital sehingga dapat ditelusuri kembali oleh petugas. Selain itu, penerapan sistem elektronik bansos juga mendukung akuntabilitas penyaluran bantuan sosial karena setiap proses pelayanan tercatat dalam sistem dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia – Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah

5. Bapak Udik Mashudi, S.E. selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bersedia meluangkan waktunya demi kelancaran proses penulisan
6. Ibu Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penulisan penyelesaian skripsi
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah meemberikan ilmu yang bermanfaat
8. Kepada sgenap Pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi khusus – Nya bapak Mansur selaku Pendamping Bantuan Sosial Kabupaten Banyuwangi terima kasih atas kesediaan dan kesempatan guna mengisi data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian skripsi berlangsung.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam peenyusunan ini. Semoga anal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepda penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Definisi istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13

A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	24
1. Sistem Informasi Akuntansi	24
2. Akuntansi Sektor Publik	35
3. Bantuan Sosial.....	38
4. Transaksi Elektronik	43
5. Akuntabilitas dalam Prespektif Syariah.....	48
6. Transparansi dalam Prespektif Syariah.....	51
7. Prinsip Keadilan dan Ketepatan Sasaran Dalam Islam	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian	60
C. Subjek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	68
F. Keabsahan data.....	71
G. Tahap-tahap Penelitian	74
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	77
A. Gambaran Objek Penelitian.....	77
1. Profil	77
2. Visi dan Misi	79
3. Tugas Pokok	80
4. Struktur Organisasi	83

B. Penyajian Data dan Analisis	84
1. Implementasi Sistem E – Bansos dalam Penyaluran Dana Bansos.....	84
2. Implementasi Sistem E – Bansos terhadap Transparansi Bansos.....	110
3. Implementasi Sistem E – Bansos terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana Bansos	113
C. Pembahasan Temuan	118
1. Implementasi Sistem E – Bansos dalam Penyaluran Dana Bansos	118
2. Implikasi terhadap Transparansi	122
3. Implikasi Terhadap Akuntabilitas	124
BAB V KESIMPULAN	129
1. Kesimpulan	129
2. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Matrik Penelitian	
Lampiran 2 Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3 Pedoman Penelitian	
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian	
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian	
Lampiran 6 Jurnal Kegiatan Penelitian	

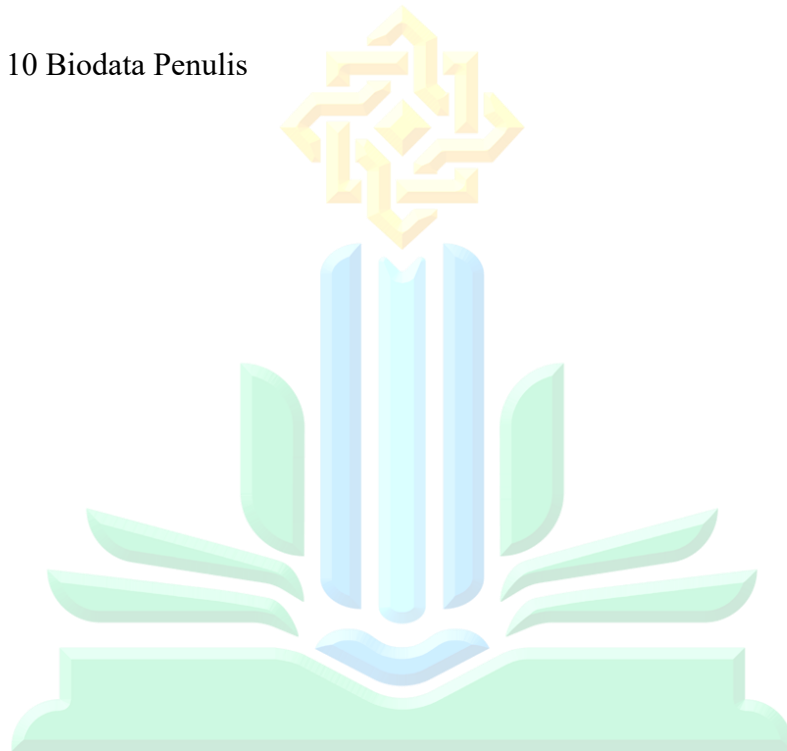
Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 8 Surat Keterangan Plagiasi

Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 10 Surat Kelengkapan Lampiran

Lampiran 10 Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	20
2.2 Tabulasi Bagan Alir (<i>Flowchart</i>)	33

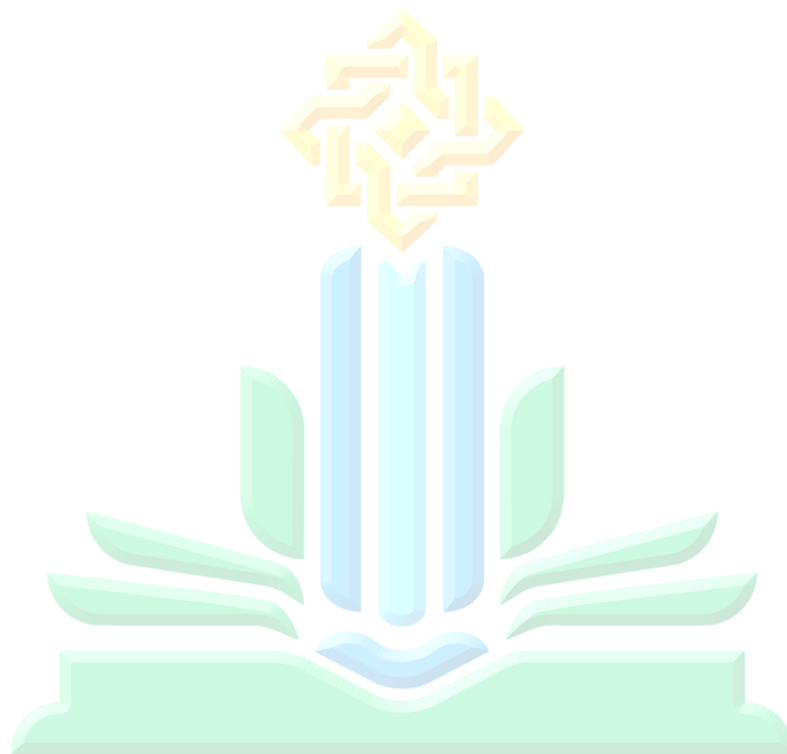


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
4.1 Struktur Organisasi DINSOSPPKB.....	84
4.2 Tampilan Login Aplikasi SIKS - NG	86
4.3 Tampilan Dhasboard Aplikasi SIKS - NG.....	87
4.4 Tampilan Mapping Pendamping E - Bansos	89
4.5 Tampilan Menu View DTSN.....	91
4.6 Menu Mutasi Penerima Manfaat	92
4.7 <i>Flowchart</i> Proses Aplikasi SIKS - NG.....	95
4.8 Portal Login Agen PRLINSOS	96
4.9 Tampilan <i>Login</i> Akun IKD	97
4.10 Tampilan Persetujuan Berbagi Data	98
4.11 Tampilan Verifikasi Wajah.....	99
4.12 Tampilan Wajah Berhasil Terverifikasi	100
4.13 Tampilan Informasi Pendaftar.....	101
4.14 Infomasi Pendaftar dan Program Bansos yang Diterima	102
4.15 <i>Flowchart</i> Proses PERLINSOS.....	105

4.16	Laporan Realisasi Anggaran.....	118
------	---------------------------------	-----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Digitalisasi tata kelola pemerintahan menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi di Indonesia, termasuk dalam sistem penyaluran bantuan sosial. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi melalui kebijakan pengembangan *e-government* guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik.² Di Kabupaten Banyuwangi, implementasi system E-Bansos digunakan dalam proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran dana bantuan sosial melalui integrasi sistem perlindungan sosial dan identitas kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Transformasi ini tidak hanya mengubah prosedur administratif, tetapi juga memengaruhi mekanisme pencatatan dan pelaporan penggunaan dana publik yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Secara regulatif, penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dirancang untuk menjamin ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu dalam distribusi bantuan kepada masyarakat.³ Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan transparansi, akurasi data penerima, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penyaluran.⁴ Namun demikian, dinamika

² Sekretariat Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E - Government,” Pub. L. No. 12, 1 (2003), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/139159/INPRES NO 3 TH 2003.pdf>.

³ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,” Pub. L. No. 13, 1 (2011), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28650/UU 13 Tahun 2011.pdf>.

⁴ Sekretariat Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,” Republik Indonesia § (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Download/63512/Perpres Nomor 63 Tahun 2017.pdf>.

implementasi di tingkat daerah menunjukkan bahwa efektivitas sistem elektronik sangat dipengaruhi oleh integrasi data pusat dan daerah, stabilitas sistem, serta kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi. Ketidaksinkronan data, kendala teknis, dan keterbatasan pemahaman operator dapat berdampak pada kualitas informasi serta ketepatan pelaporan keuangan bantuan sosial.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari belanja pemerintah yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Akuntabilitas publik menuntut adanya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya negara kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.⁵ Implementasi sistem elektronik seharusnya mampu menyediakan dokumentasi transaksi yang sistematis dan *audit trail* yang jelas sehingga setiap tahapan penyaluran dana dapat ditelusuri. Namun, belum seluruh implementasi sistem digital secara otomatis menjamin tercapainya transparansi dan akuntabilitas apabila pengendalian internal dan kualitas informasi yang dihasilkan belum optimal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyuwangi, persentase penduduk miskin di daerah ini tercatat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Maret 2025, persentase penduduk miskin mencapai 6,13 %, turun dibanding periode sebelumnya yaitu 6,54 % pada Maret 2024, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 100,13 ribu jiwa.⁶ Meskipun tren

⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, 18th Ed.*, 18th ed. (indonesia: Andi Offset, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>.

penurunan ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan secara umum, capaian statistik tersebut tidak serta-merta menggambarkan kualitas tata kelola penyaluran bantuan sosial. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, efektivitas program tidak hanya diukur dari angka penurunan kemiskinan, melainkan juga dari bagaimana sistem penyaluran dikelola secara transparan, akurat, dan akuntabel melalui teknologi informasi.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif Sistem Informasi Akuntansi, yaitu sistem yang berfungsi mengumpulkan, mencatat, memproses, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban organisasi.⁷ Dalam sektor publik, SIA berperan sebagai instrumen pengendalian internal dan penyedia informasi keuangan yang andal. Dari perspektif syariah, pengelolaan dana publik juga berkaitan dengan prinsip amanah dan keadilan. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil.⁸ Prinsip tersebut mengandung makna bahwa setiap pengelolaan dana bantuan sosial harus dilakukan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut merupakan hak masyarakat yang wajib dikelola dengan penuh tanggung jawab moral dan administratif.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Banyuwangi," Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangi, 2025), <https://banyuwangikab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/10/01/247/profil-kemiskinan-di-banyuwangi-maret-2025.html>.

⁷ Paul John Marshall B Romney, *Sistem Informasi Akuntansi, 13th Ed.*, ed. Muhammad Maskyur, 13th ed. (Salemba 4, 2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/nq/s11-VII.174.333d>.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58.," kementerian Agama, n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=1>.

Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada efektivitas program bantuan sosial atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara kajian yang secara khusus menganalisis implementasi sistem elektronik bansos dan implikasinya terhadap transparansi serta akuntabilitas penyaluran dana di tingkat pemerintah daerah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengaitkan secara komprehensif antara implementasi sistem digital dengan fungsi SIA dan nilai-nilai akuntabilitas dalam perspektif syariah. Kesenjangan tersebut menegaskan perlunya kajian yang mendalam untuk memahami proses implementasi sistem serta bagaimana implikasinya terhadap tata kelola keuangan publik di daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi sistem elektronik dalam penyaluran bantuan sosial serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik di tingkat daerah. Penelitian ini disusun dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) dan Implikasinya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Sistem E-Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap transparansi penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?

3. Bagaimana implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi Sistem E-Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap transparansi penyaluran dana bantuan sosial.
3. Untuk menganalisis implikasi implementasi Sistem E-Bansos terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi tentang kontribusi proses peneliti yang diberikan setelah selesai setelah penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat umum secara keseluruhan.⁹

Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian implementasi SIA berbasis digital pada instansi pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2019)

hubungan antara sistem elektronik dalam penyaluran bantuan sosial dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Dari perspektif syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai penerapan nilai amanah dan keadilan dalam tata kelola keuangan publik berbasis teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis diantaranya adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dan pemahaman peneliti dalam menganalisis implementasi sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman empiris dalam mengkaji keterkaitan antara SIA, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, serta memperdalam pemahaman mengenai penerapan nilai amanah dalam perspektif syariah pada sektor publik.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi akademik bagi civitas akademika UIN KHAS Jember, khususnya pada Program Studi Akuntansi Syariah dan bidang kajian akuntansi sektor publik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait implementasi sistem informasi berbasis

digital dalam tata kelola pemerintahan daerah serta penguatan nilai-nilai akuntabilitas dalam perspektif syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme implementasi E-Bansos dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui bagaimana dana bantuan sosial dikelola serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

E. Definisi Istilah

Pengertian definisi istilah adalah definisi berdasarkan indikator empiris variabel penelitian kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan definisi operasionalnya, definisi operasional adalah definisi yang digunakan sebagai pijakan pengukuran secara empiris terhadap variabel penelitian dengan rumusan yang didasarkan pada indikator variabel¹⁰, yaitu:

1. Sistem Elektronik Bansos (E – Bansos)

Sistem E-Bansos merupakan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang mengintegrasikan teknologi informasi, basis data penerima, dan sistem pembukuan digital sehingga setiap proses distribusi bantuan dapat dilakukan secara non - tunai, lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi secara sistematis. Dalam praktiknya, E-Bansos bukan sekadar aplikasi

¹⁰ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember, (Jember: IAIN Jember, Agustus 2020)

pembayaran, tetapi sebuah *information system* yang menghubungkan seluruh tahap penyaluran bantuan sosial mulai dari pendataan, verifikasi, hingga distribusi, serta pencatatan setiap transaksi pada basis data elektronik yang terpusat. Implementasi sistem ini dirancang untuk mengurangi potensi kesalahan data, menghilangkan ketidaktepatan sasaran, serta memperkuat *audit trail* yakni jejak rekam digital yang bisa ditelusuri kembali oleh pihak berwenang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.¹¹

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi digital dalam penyaluran bantuan sosial dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi distribusi dengan cara menyediakan *database* yang terintegrasi, menerapkan verifikasi otomatis data penerima, serta memungkinkan pemantauan *real-time* atas proses penyaluran bantuan. Dengan demikian, E-Bansos bukan hanya alat administrasi, tetapi juga bagian strategi dalam transformasi digital pelayanan publik yang menghubungkan komponen teknologi, data, dan kebijakan sosial di tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Ini penting karena digitalisasi penyaluran bansos memungkinkan instansi pemerintah mengidentifikasi, mengelola, serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²

¹¹ Asri Wahyuni, "Pengembangan Sistem Informasi Penerima Bantuan Sosial Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Distribusi," *Jurnal Sistem Komputer (SISKOM)*, no. Vol. 2 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.35870/siskom.v2i2.787>.

¹² Muhammad Khanif Hidayatul Khasan et al., "Persepsi Warga Masyarakat Terhadap Aplikasi Cek Bansos Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja

2. Transparansi dan Akutabilitas

Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pengelolaan sumber daya publik.¹³ Dalam penelitian ini, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi dalam proses penyaluran dana bantuan sosial.

Akutabilitas merupakan kewajiban pihak pengelola sumber daya publik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.¹⁴ Dalam akuntansi sektor publik, akutabilitas menekankan adanya pelaporan yang dapat diverifikasi dan diaudit.

3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Elektronik

Dalam perspektif administrasi publik, E-Bansos didefinisikan sebagai kebijakan modernisasi penyaluran bansos yang menggunakan platform digital untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efektivitas distribusi, dan efisiensi administrasi. Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda *good governance* yang menekankan akutabilitas, transparansi, dan pengurangan potensi penyalahgunaan anggaran publik. Dengan digitalisasi, pemerintah dapat mengurangi rantai birokrasi yang panjang,

Kabupaten Banyumas Jawa Tengah,” *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 2025, <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/10.31595/lindayasos.v7i1.1604>.

¹³ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,” Republik Indonesia § (2008), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28425/UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28425/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202008.pdf).

¹⁴ Rina Silvia, Intiyas Utami, and Usil Sis Sucahyo, “Strategi Pemitigasan Bias Pengukuran Umum Dalam Evaluasi Balanced Scorecard Dengan Balikan Eksplanatori Rina,” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 2 (2016): 69–84, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art1>.

menekan praktik perantara, dan memastikan dana bantuan diterima langsung oleh penerima manfaat.¹⁵

Dalam konteks SIA, penyaluran dana E-Bansos merupakan aktivitas disbursement yang seluruh prosesnya dicatat, diproses, dan diawasi melalui sistem akuntansi berbasis komputer. Sistem ini menetapkan bahwa setiap transaksi penyaluran harus tercatat secara otomatis, diverifikasi oleh sistem, dan dapat ditelusuri dalam modul audit trail. Dengan demikian, E-Bansos dipandang sebagai bagian dari subsistem cash disbursement yang berfungsi meningkatkan integritas data, mencegah fraud, dan menyediakan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat direkonsiliasi dengan lembaga keuangan.¹⁶

4. Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi

Adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Sosial Banyuwangi diposisikan sebagai objek kajian karena instansi ini berperan langsung dalam pencatatan, pengawasan, dan pelaporan transaksi E-Bansos. Penelitian sebelumnya di Banyuwangi menegaskan bahwa perancangan sistem informasi manajemen bantuan sosial berbasis web diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan distribusi bansos, karena

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18th Ed.

¹⁶ Marshall B Romney and Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems* (Pearson, 2018).

mekanisme manual masih menimbulkan berbagai keterbatasan dalam hal transparansi dan akurasi data.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan menguraikan gambaran umum penelitian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bab ini berfungsi sebagai dasar pemahaman awal mengenai latar belakang dan arah penelitian tentang implementasi Sistem E-Bansos serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

Bab II kajian pustaka ini membahas landasan teoritis dan konseptual yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan meliputi penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori tentang SIA, akuntansi sektor publik, bantuan sosial, serta konsep-konsep pendukung lainnya yang berkaitan dengan sistem akuntansi digital dan penyaluran E-Bansos.

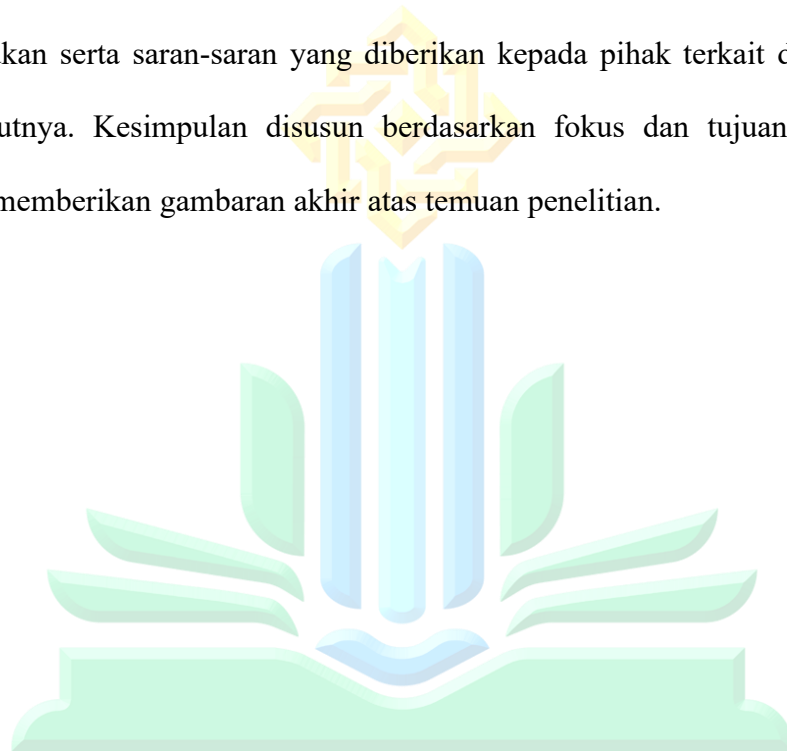
Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian. Bab ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian lapangan terkait implementasi E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan

¹⁷ Hali Mukid and Ahmad Homaidi, "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 14–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1071>.

difokuskan pada analisis implementasi Sistem E-Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan teori dan kajian pustaka.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diberikan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan fokus dan tujuan penelitian guna memberikan gambaran akhir atas temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu terkadang terdapat tema yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, meskipun arah dan tujuan penelitian tersebut berbeda. Dari penelusuran berbagai sumber, peneliti menemukan sejumlah skripsi yang telah lebih dulu membahas mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sistem akuntansi keuangan publik, serta penerapan sistem digital pada tata kelola keuangan daerah. Penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini karena sama-sama menyoroti penggunaan teknologi informasi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, meskipun objek kajiannya berbeda. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merujuk beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan pijakan teoritis dalam menganalisis penerapan sistem akuntansi berbasis digital pada pencatatan transaksi E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan ini adalah:

1. Rama dalam skripsinya Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kabupaten Ogan Komering Ilir mengkaji faktor teknis dan non-teknis dalam implementasi SIPD. Peneliti menemukan bahwa pelatihan berkelanjutan dan kejelasan alur kerja sangat penting

agar data dapat konsisten dan laporan bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital tidak bisa dilepaskan dari faktor manusia, baik dari segi pelatihan maupun koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Relevansinya dengan penelitian ini adalah kemungkinan munculnya kendala serupa dalam pencatatan bansos elektronik di Banyuwangi.¹⁸

2. Skripsi dari Nurkadri Arw dengan judul Penerapan SIA Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap Penelitian ini menilai penerapan SIA dalam mendukung kinerja keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan SIA membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan, meski terkendala keterbatasan SDM dan perbedaan pemahaman standar akuntansi. Relevansinya dengan penelitian ini adalah perlunya integrasi sistem digital dengan kompetensi operator agar pencatatan bansos akurat dan transparan.¹⁹
3. Penelitian Nur Afifah berjudul Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai menilai sejauh mana SIPD membantu perencanaan dan penganggaran. Temuan utamanya adalah bahwa meski SIPD sangat bermanfaat, efektivitasnya sering terhambat oleh keterbatasan jaringan internet, perangkat komputer, serta kurangnya operator terlatih. Hal ini

¹⁸ Ariq Hikmal Athallah, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Ajaran 2024" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024).

¹⁹ Nurkandi. ARW, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah) Semester Genap Tahun Ajaran 2024" (Skripsi, IAIN Perepare, 2024).

membuat laporan menjadi lambat dan kadang tidak akurat. Relevansi penelitian ini adalah memperlihatkan pentingnya kesiapan teknis dan operasional untuk menjamin keberhasilan sistem digital, termasuk dalam pencatatan transaksi E-Bansos.²⁰

4. Skripsi oleh Munawir Jauhari berjudul Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang membahas bagaimana SIPD dijalankan di BPKAD. Penelitiannya menekankan variabel penting seperti komunikasi antarbagian, ketersediaan sumber daya, disposisi pegawai, dan struktur birokrasi. Ia menemukan bahwa meskipun perangkat lunak SIPD sudah tersedia, hambatan birokrasi dan koordinasi sering mengurangi efektivitas implementasi. Temuan ini memberi pelajaran bahwa penerapan sistem digital tidak bisa hanya dilihat dari perangkat yang dipakai, tetapi juga dari kesiapan orang-orang yang mengoperasikannya. Relevansi dengan penelitian ini jelas, sebab sistem akuntansi E-Bansos juga akan sangat dipengaruhi oleh faktor birokrasi dan kapasitas SDM.²¹

5. Arsen Anggoro Feby Laksono & Nurgiyatna dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan Bantuan Sosial (Studi Kasus Desa Wonokerto, Kabupaten Ngawi) mengkaji

²⁰ Shinta Nur Afifah, Anton Subarno, and Nur Rahmi Akbarini, "Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Wonosobo," *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 7 (2023): 212, <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>.

²¹ Munawir Jauhari, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjung Pinang Tahun Ajaran 2023" (Skripsi, STIE Tanjung Pinang, 2023).

bagaimana sistem informasi berbasis digital dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan sekaligus mendukung proses distribusi bantuan sosial. Fokus utama penelitian ini mencakup tahapan pendaftaran penerima bantuan, proses verifikasi identitas, pengelolaan database penerima, hingga pelaporan penyaluran bansos secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi ini mampu mempercepat proses administrasi dibanding metode manual, mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan data, serta membantu aparat desa melakukan monitoring penyaluran secara lebih terstruktur. Namun, penelitian tersebut juga menemukan adanya hambatan yang cukup signifikan, seperti keterbatasan perangkat keras, gangguan jaringan internet di wilayah desa, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparatur dan masyarakat yang berperan sebagai operator maupun pengguna layanan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh rancangan

teknologinya, tetapi juga kesiapan infrastruktur serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Relevansi penelitian

ini dengan penelitian tentang pencatatan transaksi bansos elektronik di Dinas Sosial Banyuwangi terletak pada kesamaan konteks tantangan, di mana akurasi data penerima, efisiensi administrasi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi aspek penting yang harus diatasi

agar sistem akuntansi digital bansos benar-benar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.²²

6. Skripsi dari Zulfikar Fikri Amri berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menguraikan pengalaman implementasi SIPD di daerah dengan menyoroti tahapan penerapan, kendala jaringan, dan indikator keberhasilan. Peneliti menekankan bahwa keberhasilan sering diukur dari keterisian data yang lengkap dan ketepatan pelaporan. Namun, masih banyak hambatan teknis seperti jaringan internet yang lambat dan prosedur kerja yang belum seragam. Hal ini sangat berkaitan dengan penelitian ini, sebab masalah teknis yang sama juga bisa muncul dalam penerapan sistem akuntansi bansos digital.²³
7. Skripsi dari Rizki Debi Istiawan dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pos Tanjungpinang. Penelitian ini menguji pengaruh pengendalian internal dan SIA terhadap kualitas laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan keduanya berperan signifikan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Relevansi dengan penelitian ini sangat erat karena pencatatan bansos

²² Arsen Anggoro Feby Laksosno and Nurgiyatna, "Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dan Bantuan Sosial" 1 (2023): 138–46.

²³ Zulfikar Fikri Amri, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Semarang Timur) Tahun Ajaran 2022" (Skripsi, Universitas Semarang, 2022).

digital juga bertujuan menghasilkan laporan yang berkualitas dengan sistem pengendalian internal yang kuat.²⁴

8. Yahfie Aditya Sasmitra dalam skripsinya *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Peningkatan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat* meneliti hubungan penerapan SIPD dengan peningkatan kinerja aparatur, dengan temuan bahwa sistem digital ini mampu memperbaiki efisiensi kerja dan keteraturan administrasi, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan pegawai, kesiapan infrastruktur, serta kejelasan prosedur operasional yang digunakan. Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa dukungan SDM dan regulasi yang jelas, sehingga meskipun SIPD terbukti meningkatkan kinerja, masih terdapat tantangan pada aspek pelatihan dan konsistensi penggunaan sistem. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada kesamaan kebutuhan akan integrasi teknologi dan kemampuan manusia, di mana pada konteks Dinas Sosial Banyuwangi, pencatatan transaksi bansos elektronik juga sangat bergantung pada kompetensi operator, kejelasan alur pencatatan, dan infrastruktur jaringan agar mampu mendorong akuntabilitas serta transparansi distribusi bansos.²⁵

²⁴ Wan Rizki Debi Istiawan, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Pos Tanjungpinang 29100 Tahun Ajaran 2022" (Skripsi, STIE Pembangunan, 2022).

²⁵ Yahfie Aditya Sasmita, "Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2021" (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021).

9. Skripsi dari Wasulistiowati Aprillya Eka berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai pada Kelurahan Desa Gembong Berbasis Web Responsif Menggunakan Notifikasi WhatsApp (Universitas Muria Kudus) Penelitian ini membahas pengelolaan program BLT di Desa Gembong dengan membuat sistem berbasis web yang responsif dan dilengkapi notifikasi WhatsApp agar penerima bantuan lebih cepat mendapatkan informasi dan proses administrasi lebih terorganisir. Temuannya menunjukkan bahwa sistem ini mampu meminimalkan keterlambatan dan kesalahan input data, meskipun beberapa fitur masih perlu penyempurnaan seperti integrasi dengan sistem keuangan yang lebih resmi.²⁶
10. S. Marsela dari UIN Suska menulis skripsi Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan. Fokus utamanya adalah mekanisme pencairan dan pentingnya bukti transaksi sebagai dasar audit. Penelitian ini mengingatkan bahwa setiap transaksi bansos harus terdokumentasi dengan baik untuk menjaga akuntabilitas. Penelitian ini memperkaya kajian dengan menegaskan peran prosedur akuntansi dalam menjamin ketepatan penyaluran bansos.²⁷

²⁶ Sulistiowati Aprilia Eka Wardani, "Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Pada Kelurahan Desa Gembong Berbasis Web Responsif Menggunakan Notifikasi Whatsapp Tahun Ajaran 2021" (Skripsi, Universitas Mulia Kudus, 2021).

²⁷ Selli Marsela, "Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Ajaran 2020" (Skripsi, UIN Suska Riau, 2020).

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rama, 2024 Implementasi SIPD pada Kabupaten Ogan Komering Ilir	Hasil penelitian Rama menegaskan pentingnya infrastruktur, pelatihan, dan koordinasi dalam efektivitas implementasi SIPD. Kesamaan dengan penelitian ini ada pada sorotan terhadap kesiapan teknis dan non-teknis yang memengaruhi keberhasilan digitalisasi.	Perbedaannya, Rama lebih menekankan evaluasi pelatihan dan kebijakan implementasi SIPD secara luas, sementara penelitian ini mendalami bagaimana pencatatan bansos digital yang akurat dapat berdampak langsung pada keadilan distribusi dan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
2.	Nurkadri Arw, 2024, Penerapan SIA Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Kabupaten Sidrap	Persamaan terlihat pada pandangan bahwa penerapan SIA akan meningkatkan efisiensi, akurasi laporan, dan mendukung kinerja keuangan daerah. Penelitian ini juga memiliki titik temu pada aspek kebutuhan SDM yang kompeten agar sistem bisa berjalan optimal.	Perbedaan yang jelas, Nurkadri lebih menekankan pengaruh SIA terhadap kinerja keuangan secara makro, sementara penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada pencatatan bansos digital dengan dimensi sosial-akuntansi, seperti transparansi publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
	Nur Afifah, 2023 Efektivitas Penerapan SIPD	Nur Afifah menyoroti bagaimana SIPD membantu	Namun, Nur Afifah fokus pada perencanaan dan

3.	pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinja	mempercepat administrasi dan meningkatkan keteraturan laporan. Hal ini selaras dengan penelitian ini karena sama-sama melihat digitalisasi sebagai solusi bagi keterbatasan sistem manual.	penganggaran sektor pangan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada distribusi bansos. Implikasi sosial, seperti ketepatan penerima dan transparansi publik, menjadi dimensi tambahan yang tidak dibahas dalam penelitian Nur Afifah.
4.	Munawir Jauhari, 2023 Implementasi Aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Tanjungpinang	Penelitian Munawir Jauhari memperlihatkan bahwa implementasi sistem digital di lingkungan pemerintahan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan pola koordinasi antarunit. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang juga menekankan peran manusia dan organisasi sebagai faktor penentu keberhasilan.	Namun, jika Munawir lebih fokus pada hambatan birokrasi dan pola komunikasi antarbagian dalam implementasi SIPD, penelitian ini diarahkan pada kajian fungsi akuntansi dalam pencatatan bansos elektronik. Aspek validitas data penerima, rekonsiliasi transaksi, serta implikasi transparansi publik menjadi pembeda utama.
5.	Arsen Anggoro Feby Laksono & Nurgiyatna, 2023 Sistem Informasi Manajemen	Arsen dan Nurgiyatna menekankan perlunya sistem digital untuk mengelola data bansos secara terintegrasi, yang juga menjadi perhatian penelitian ini. Sama-sama ada penekanan pada pentingnya validasi data	Bedanya, penelitian Arsen menyoroti keterbatasan infrastruktur dan literasi digital aparat desa, sementara penelitian ini fokus pada level dinas sosial. Konsekuensinya, pembahasan

		penerima agar distribusi bantuan berjalan adil.	penelitian ini lebih menekankan integrasi akuntansi digital untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
6.	Zulfikar Fikri Amri, 2022 berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Penelitian ini menemukan titik persamaan dengan skripsi di USM, yakni pemahaman bahwa indikator keberhasilan implementasi sistem dapat dilihat dari ketepatan laporan, keterisian data, dan peran operator.	Akan tetapi, penelitian Zulfikar Fikri Amri cenderung bersifat deskriptif mengenai tahapan dan variasi implementasi antarwilayah, sedangkan penelitian ini lebih kritis pada aspek akuntansi bansos digital, misalnya audit trail, rekonsiliasi, dan kontrol internal.
7.	Rizki Debi Istiawan, 2022 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Pos Tanjungpinang	Rizki Debi menekankan peran penting SIA dan kontrol internal dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat diaudit. Hal ini selaras dengan penelitian ini yang juga melihat kontrol internal sebagai fondasi keandalan pencatatan bansos digital.	Namun, penelitian Rizki dilakukan pada BUMN (Kantor Pos) dengan konteks bisnis pelayanan publik, sedangkan penelitian ini berfokus pada lembaga pemerintahan daerah (Dinas Sosial) dan lebih menyoroti implikasi pencatatan bansos terhadap akuntabilitas sosial dan kepercayaan publik.
	Yahfie Aditya Sasmitra, 2021 Pengaruh Penerapan SIPD terhadap Peningkatan Kinerja pada	Sama-sama menekankan bahwa keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada keterampilan operator dan	Penelitian tersebut mengukur kinerja organisasi secara kuantitatif, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada

8.	BPKAD Kabupaten Langkat	kejelasan SOP. Baik penelitian tersebut maupun penelitian ini menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan kualitas administrasi dan kinerja jika didukung oleh SDM yang kompeten.	dimensi kualitatif berupa transparansi, akuntabilitas, serta bagaimana pencatatan digital memengaruhi distribusi bansos dan kepercayaan publik.
9.	Sulistiowati Aprilly Eka Wardani, 2021 Sistem Informasi Pengelolaan BLT Berbasis Web Responsif	Skripsi ini memiliki kemiripan dengan penelitian ini karena keduanya menekankan pentingnya digitalisasi bansos untuk memastikan ketepatan sasaran dan transparansi. Baik penelitian ini maupun karya Sulistiowati sama-sama menilai bahwa sistem berbasis digital mampu mengurangi kesalahan manual.	Perbedaannya, penelitian Sulistiowati terfokus pada perancangan aplikasi teknis dengan fitur notifikasi untuk warga, sedangkan penelitian ini melihat lebih jauh pada pencatatan akuntansi bansos, seperti jurnal transaksi, rekonsiliasi, dan integrasi dengan laporan keuangan daerah.
10.	S. Marsela, 2020 Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana PKH	S. Marsela menegaskan bahwa pencatatan transaksi, bukti pembayaran, dan rekonsiliasi adalah unsur penting dalam penyaluran bansos. Pandangan ini sejalan dengan penelitian ini yang sama-sama menilai akuntansi sebagai sarana menjaga akuntabilitas dan auditabilitas.	Akan tetapi, Marsela lebih banyak menggambarkan prosedur administrasi pencairan PKH secara manual, sedangkan penelitian ini menghubungkan prosedur tersebut dengan sistem akuntansi digital modern yang memungkinkan rekonsiliasi otomatis, laporan real-time, dan

			pelacakan transaksi.
--	--	--	----------------------

Sumber: Penelitian terdahulu yang diolah

Dari pemetaan penelitian terdahulu terlihat bahwa kesamaan utamanya terletak pada perhatian terhadap peran SIA dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan publik. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti implementasi teknis dan kinerja organisasi, penelitian ini berfokus pada pencatatan transaksi bansos dan penyaluran bansos secara elektronik dengan penekanan pada akuntabilitas sosial dan transparansi publik di tingkat pemerintah daerah.

B. Kajian teori

a. Sistem Informasi Akuntansi

1) Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart dalam buku *Accounting Information Systems*, Sistem Informasi Akuntansi (*Accounting Information System*) adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan dalam suatu organisasi.

Sistem ini juga mencakup manusia, prosedur, serta teknologi informasi yang digunakan.²⁸

Bodnar dan Hopwood menyatakan Sistem Informasi Akuntansi adalah sekumpulan sumber daya dan daya (*resources*), seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan

²⁸ Paul John Steinbart Marshall B Romney, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, 13th ed., 2020, <https://doi.org/10.1093/nq/s11-VII.174.333d>.

dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam.

Menurut Dandago dan Rufai sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian.²⁹

Definisi Sistem Informasi Akuntansi menurut Wing adalah Sistem Informasi Akuntansi ialah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Data dapat diolah menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer.³⁰

Menurut Mulyadi menyatakan sistem informasi akuntansi adalah organisasi Formulir, catatan, dan Laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.³¹

Perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem informasi telah mengubah cara lembaga dalam menyampaikan laporan dan mengelola

²⁹ F Zamzami et al., *Sistem Informasi Akuntansi* (UGM PRESS, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=tMXEAAAQBAJ>.

³⁰ Lindrawati, "Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Data Prosesing," *Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi* 1 (2001): 27–34.

³¹ Ditha Amelia Rumfek, "Analisis Pengendalian Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Malang Kota," *Sistem Informasi Akuntansi*, 2021, 167–86.

informasi keuangan. Dalam konteks lembaga ekonomi Islam, Amalia dan Siswanto menjelaskan bahwa era digital memperkuat akuntabilitas lembaga melalui transparansi laporan yang disampaikan secara digital, sehingga meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap pengelolaan dana lembaga.³²

Selain itu, Masruroh menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen berbasis digital seperti SIMBA memberikan kontribusi terhadap efektivitas kerja serta transparansi proses organisasi, yang pada gilirannya mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel. Temuan ini mendukung pernyataan bahwa digitalisasi sistem informasi akuntansi dapat memperkuat akuntabilitas dan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan dana bantuan sosial melalui sistem E-Bansos.³³

Dengan menggabungkan beberapa pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pada hakikatnya adalah sistem formal yang terdiri atas subsistem, prosedur, dan komponen organisasi yang saling terkoordinasi untuk mengolah data keuangan menjadi informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Informasi ini selanjutnya digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengendalian internal, meningkatkan efektivitas

³² Mildatul Anzu Amalia and Adil Siswanto, "Analysis of the Perceptions of Students of the Faculty of Economics and Islamic Business towards the Accountability of the Jember Amil Zakat Institution in the Digital Era," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 688–93, <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i2.2692>.

³³ Nikmatul Masruroh et al., "Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan," *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 845–52, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.

manajerial, serta memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik internal organisasi maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap informasi keuangan.

2) Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Sistem memiliki sejumlah karakteristik atau sifat khusus yang menentukan cara kerjanya, antara lain:³⁴

- a) Komponen Sistem (*Component*), Sistem tersusun atas berbagai elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk membentuk satu kesatuan yang terorganisir.
- b) Batasan Sistem (*Boundary*), Merupakan area yang memisahkan suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan di sekitarnya.
- c) Subsistem, Bagian-bagian dalam suatu sistem yang saling berinteraksi dan menjalankan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan masing-masing.
- d) Lingkungan Luar Sistem (*Environment*), Elemen di luar batas sistem yang dapat mempengaruhi operasional sistem tersebut.
- e) Penghubung Sistem (*Interface*), Mekanisme yang menghubungkan satu subsistem dengan subsistem lainnya, memungkinkan aliran sumber daya dan informasi di dalam sistem.

³⁴ Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akuntansi* (Semarang: Yayasan Agus Teknik, 2021).

- f) Masukan Sistem (*Input*), Energi atau data yang masuk ke dalam sistem, yang terdiri dari masukan operasional dan masukan perawatan guna menjaga kinerja sistem.
 - g) Keluaran Sistem (*Output*), Hasil akhir dari proses yang terjadi dalam sistem, yang dapat berupa output bermanfaat atau residu yang harus dibuang.
 - h) Pengolahan Sistem (*Proses*), Mekanisme dalam sistem yang mengolah masukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
 - i) Sasaran Sistem (*Objective*), Tujuan yang ingin dicapai oleh sistem, di mana keberhasilan sistem ditentukan oleh kemampuannya dalam mencapai sasaran tersebut
- 3) Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Roomey, Sistem informasi akuntansi memiliki tiga fungsi penting dalam organisasi yaitu:³⁵

- a) Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.

³⁵ Luna Theresia Tambunan, "Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelaporan Keuangan Pada Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 1 (2020): 1–15.

- b) Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c) Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

Keandalan sistem informasi akuntansi karena SIA menyimpan dan menyediakan informasi bisnis yang berharga, keandalan sangat penting. *American Institute of CPA* (AICPA) dan *Canadian Institute of Chartered Accountants* (CICA) telah mengidentifikasi lima prinsip dasar yang penting untuk keandalan AIS:³⁶

a) Keamanan

Akses ke sistem dan datanya dikendalikan dan dibatasi hanya untuk yang berwenang.

b) Kerahasiaan

Perlindungan informasi sensitif dari pengungkapan yang tidak sah (Privasi).

c) Pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi tentang pelanggan dilakukan dengan cara yang tepat.

d) Integritas pemrosesan

³⁶ Renika Hasibuan et al., *Sistem Akuntansi*, ed. S.Pd Penyunting Ariyanto, M.Pd, Tri Putri Wahyuni, *Sistem Akuntansi*, 1st ed., vol. 19 (PT Global Eksekutif Teknologi, 2022).

Pemrosesan data yang akurat, lengkap, dan tepat waktu yang dilakukan dengan otorisasi yang tepat.

- e) Ketersediaan Sistem tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontrak.

Sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat komponen yang saling terkait, yang berinteraksi, untuk mencapai suatu tujuan.³⁷

Dengan demikian, fungsi SIA tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi, tetapi juga berperan penting dalam pengendalian internal, pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas, yang menjadi dasar keberhasilan implementasi E-Bansos.

4) Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut Romney dan Steinbart yaitu:³⁸

- a) Para pengguna yang menggunakan sistem.
- b) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpul, memproses, dan menyimpan data.
- c) Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.

³⁷ Hasibuan et al.

³⁸ Tuti Dharmawati et al., *Sistem Informasi Akuntansi* (Penerbit Adab, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=mGvLEAAQBAJ>.

- d) Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
- e) Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
- f) Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

Sedangkan menurut Burch Grudnitski komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari:³⁹

- a) Masukan (*Input Block*)
- b) Model (*Model Block*)
- c) Keluaran (*Output Block*)
- d) Teknologi (*Technology Block*)
- e) Basis Data (*Database Block*)
- f) Pengendalian (*Control Block*)

Dari pendapat diatas terdapat persamaan komponen pada basis data (*database*), Teknologi (*Hardware* dan *Software*), serta pengendalian (*Control*).

Jika dibandingkan, kedua pendapat tersebut memiliki titik temu pada pentingnya basis data, teknologi, serta pengendalian sebagai komponen pokok dalam sistem informasi akuntansi. Persamaan ini menunjukkan bahwa baik dalam perspektif modern Romney dan Steinbart maupun

³⁹ Dharmawati et al.

klasik Burch dan Grudnitski, sistem informasi akuntansi selalu menempatkan data, teknologi, dan kontrol sebagai aspek yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam konteks penelitian ini, komponen-komponen tersebut sangat relevan untuk dianalisis karena penyaluran dana bansos elektronik (E-Bansos) di Dinas Sosial Banyuwangi menuntut keakuratan data penerima, infrastruktur teknologi informasi yang andal, serta prosedur pengendalian internal yang dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas. Basis data penerima bansos harus valid agar distribusi bantuan tepat sasaran, teknologi digital yang digunakan harus mampu mendukung proses pencatatan dan pelaporan, serta pengendalian internal diperlukan untuk mencegah kecurangan maupun kesalahan administrasi. Dengan demikian, teori komponen sistem informasi akuntansi dapat dijadikan pijakan untuk menilai sejauh mana sistem pencatatan *E-Bansos* sudah memenuhi unsur-unsur penting dalam praktik SIA.

5) Bagan *Flowchart*

Bagan alir (*flowchart*) adalah teknik analisis visual yang digunakan untuk menggambarkan berbagai aspek dalam sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan ini mencatat bagaimana proses bisnis dijalankan serta bagaimana dokumen mengalir dalam suatu organisasi. Selain itu, bagan alir juga berfungsi untuk menganalisis serta meningkatkan efisiensi proses bisnis dan aliran dokumen. Dalam

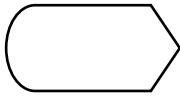
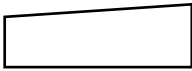
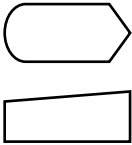
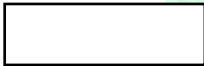
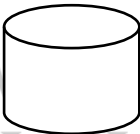
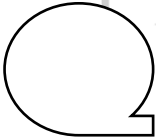
penyajianannya, bagan alir menggunakan simbol standar untuk menggambarkan prosedur pemrosesan transaksi yang diterapkan perusahaan serta aliran data dalam sistem. Simbol dalam bagan alir dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu:⁴⁰

- 1) Simbol *Input/Output* Menunjukkan data yang masuk ke dalam sistem atau hasil yang dihasilkan oleh sistem.
- 2) Simbol Pemrosesan Menggambarkan proses pengolahan data, baik secara manual maupun elektronik..
- 3) Simbol Penyimpanan Menunjukkan tempat penyimpanan data dalam sistem.
- 4) Simbol Arus dan Lain-lain Mengilustrasikan aliran data, titik awal dan akhir bagan, pengambilan keputusan, serta catatan tambahan dalam bagan alir.

Tabel 2.2
Tabulasi Bagan Alir (*Flowcart*)

Simbol	Nama	Penjelasan
Simbol Input/Output		
	Dokumen	Dokumen atau laporan elektronik atau kertas
	Berbagai salinan dokumen kertas	Diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas.

⁴⁰ Marshall B Romney, *Sistem Informasi Akuntansi, 13th Ed.*

	Output Elektronik	Informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar.
	Entri data Elektronik	Alat entri data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, atau telepon.
	Alat <i>input</i> dan <i>output</i> elektronik	Entri data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya.
Simbol Pemrosesan		
	Pemrosesan Komputer	Fungsi pemrosesan yang Dilakukan oleh komputer biasanya Menghasilkan perubahan dalam data atau informasi.
	Operasi Manual	Operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual.
Simbol Penyimpanan		
	<i>Database</i>	Data yang disimpan secara elektronik dalam database.
	Pita Magnetis	Data yang disimpan dalam pitamagnetis; pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer.

Sumber: Buku Sistem Informasi Akuntansi

b. Akuntansi Sektor Publik

1) Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Definisi Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.⁴¹

Menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan oleh lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat.⁴²

Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik adalah alat informasi yang berperan sebagai manajemen bagi pemerintah dan berperan sebagai alat informasi bagi publik.⁴³

Menurut Halim, akuntansi sektor publik adalah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁴

Menurut definisi di atas, akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan pelayanan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan

⁴¹ Drs. Tulis S. Meliala, Akt, Niko Silitonga, SE., MM, and Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA, "Akutansi Sektor Publik Edisi2," *Penerbit Semesta Media*, 2007, 10.

⁴² Etty Gurendrawati et al., *Akuntansi Sektor Publik*, ed. M. Pd Kodri, 1st ed. (Bumi Aksara, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=ITUVEQAAQBAJ>.

⁴³ Gurendrawati et al.

⁴⁴ Gurendrawati et al.

dalam pelayanan publik. Sementara akuntansi sektor publik adalah proses pengklasifikasian, pencatatan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan sebagai penilaian dan pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut.⁴⁵

2) Regulasi Akuntansi sektor Publik

Regulasi dan standar akuntansi sektor publik di Indonesia sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Di Indonesia, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. SAP diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah. Standar ini mengatur bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan entitas lainnya disusun dan disajikan.

Salah satu regulasi utama yang mendasari akuntansi sektor publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.⁴⁶ UU ini menetapkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan negara, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

⁴⁵ Gurendrawati et al.

⁴⁶ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara” (2003), https://peraturan.bpk.go.id/Download/31132/UU_Nomor_17_Tahun_2003.pdf.

Tanggung Jawab Keuangan Negara juga memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan dan akuntabilitas keuangan publik.⁴⁷

SAP di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pengguna, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat umum. Standar ini mencakup berbagai aspek akuntansi, seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan. Beberapa standar utama dalam SAP antara lain PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, dan PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.

Penerapan SAP di Indonesia juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Surat Edaran yang memberikan pedoman teknis untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. PMK ini membantu memastikan bahwa standar akuntansi diterapkan secara konsisten di seluruh entitas pemerintah, sehingga meningkatkan komparabilitas dan keandalan laporan keuangan.

Contohnya, PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat memberikan panduan rinci mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan.⁴⁸

Penerapan regulasi dan standar akuntansi sektor publik memiliki relevansi langsung terhadap penyaluran bansos elektronik (E-

⁴⁷ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” (2004), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/30197/UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/30197/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202004.pdf).

⁴⁸ Salomi Jacomina Hehanussa, *Akuntansi Sektor Publik*, ed. Yogi and Widi (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=THwIEQAAQBAJ>.

Bansos) di Dinas Sosial Banyuwangi. Proses pencatatan dan pelaporan bansos merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Dengan mengacu pada SAP dan regulasi terkait, pencatatan bansos berbasis digital dapat diarahkan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntansi sektor publik. Hal ini berarti, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknis sistem akuntansi berbasis digital, tetapi juga menilai sejauh mana praktik pencatatan E-Bansos telah sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi nasional yang berlaku.

c. Bantuan Sosial

1) Definisi Bantuan Sosial

Menurut Suharto yang telah dikutip oleh Ratna, bantuan sosial adalah layanan publik yang diberikan kepada penduduk dan rumah tangga yang sangat miskin, terutama dengan menggunakan prinsip solidaritas vertikal karena tidak mempertimbangkan kontribusi ataupun premi dari penerima manfaat.⁴⁹

Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip Supriyanto, Ramdani, dan Rahmadan bantuan sosial adalah bantuan yang ditujukan pada rumah tangga segmen terbawah, dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki sumber daya, mengurangi eksklusi sosial, dan

⁴⁹ Hartini Retnaningsih, "Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 215–27, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>.

meminimalkan disinsentif tenaga kerja. Manfaat yang diberikan berupa program jaminan sosial, namun tanpa skema asuransi sosial dan pembayaran/kontribusi dari penerima manfaatnya.⁵⁰

Dari berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial pada hakikatnya merupakan bentuk layanan publik yang ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan dengan prinsip solidaritas. Bantuan ini tidak menuntut kontribusi atau premi dari penerima manfaat, melainkan diberikan murni sebagai upaya negara atau lembaga sosial untuk mengurangi kerentanan, mencegah eksklusi sosial, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan terbawah. Dengan demikian, bantuan sosial dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada keberpihakan kepada kelompok lemah tanpa persyaratan timbal balik dari penerimanya.

2) Tujuan Bantuan Sosial

Bantuan sosial pada dasarnya dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat miskin, rentan, dan terdampak berbagai kondisi sosial maupun ekonomi. Menurut Suharto, tujuan utama bantuan sosial adalah untuk mengurangi kerentanan sosial, melindungi kelompok lemah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial tidak hanya memberikan manfaat berupa dukungan ekonomi, tetapi

⁵⁰ Retnaningsih.

juga memiliki dimensi sosial dalam memperkuat solidaritas dan mengurangi kesenjangan antar kelompok masyarakat.⁵¹

Di sisi lain, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung fungsi sosial masyarakat, serta mengembalikan keberfungsian sosial individu maupun rumah tangga yang mengalami permasalahan sosial.⁵² Dengan demikian, program bansos tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga strategis dalam membangun kemandirian sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Jurnal karya Katiman berjudul *The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy: Its Origin and Development* membahas sejarah dan perkembangan program perlindungan sosial di Indonesia serta perannya dalam perekonomian nasional. Artikel ini menekankan bahwa bantuan sosial bukan hanya kebijakan karitatif, melainkan instrumen penting dalam mitigasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Katiman menyoroti bagaimana dinamika politik, sosial, dan ekonomi membentuk orientasi program bansos sehingga berfungsi ganda sebagai jaring pengaman (*safety net*) bagi kelompok miskin dan sarana investasi sosial untuk mendukung stabilitas, inklusi, serta keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian,

⁵¹ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2014).

⁵² Sekretariat Republik Indonesia, “Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan” (2008), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28061/Perda 17 Thn 2008 SOTK Dinas Peternakan.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28061/Perda%2017%20Thn%202008%20SOTK%20Dinas%20Peternakan.pdf).

tujuan bantuan sosial dipahami lebih luas daripada sekadar pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional.⁵³

Dengan berbagai perspektif tersebut, jelas bahwa tujuan bantuan sosial mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia. Bansos bukan hanya sekadar distribusi bantuan finansial atau material, melainkan juga upaya struktural untuk meningkatkan kualitas hidup, menjaga keadilan sosial, serta mendorong inklusi dalam pembangunan nasional.

3) Regulasi Bantuan Sosial

Regulasi bantuan sosial di Indonesia disusun untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan mekanisme, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan sosial kepada masyarakat. Payung hukum utama dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari upaya perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang mengalami masalah sosial.⁵⁴

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan landasan mengenai sasaran penerima bansos, mekanisme pendataan, serta prinsip penyaluran agar

⁵³ Katiman, "The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy: Its Origin and Development," *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 16, no. 1 (2012): 21–38.

⁵⁴ Republik Indonesia, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan.

tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.⁵⁵ Regulasi ini memperkuat komitmen pemerintah dalam menyediakan jaringan pengaman sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dalam tataran teknis, Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi acuan penting dalam memastikan akurasi data penerima manfaat. Melalui DTKS, pemerintah berupaya membangun basis data yang terintegrasi agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih transparan dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan.⁵⁶

Selanjutnya, regulasi bantuan sosial juga diperkuat melalui kebijakan keuangan negara. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai, yang menandai peralihan sistem penyaluran bansos dari konvensional menuju sistem digital. Peraturan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memperkuat akuntabilitas dengan adanya jejak transaksi yang lebih jelas dan terukur.⁵⁷

Dengan demikian, regulasi bantuan sosial di Indonesia menunjukkan upaya sistematis pemerintah dalam mengatur,

⁵⁵ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun,” Republik Indonesia § (2011), https://peraturan.bpk.go.id/Download/28684/UU_20_Tahun_2011.pdf.

⁵⁶ Pemerintah Kota Palu, “Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial,” Republik Indonesia § (2021), https://peraturan.bpk.go.id/Download/179309/No_20_TH_2021.pdf.

⁵⁷ Pemerintah Kota Medan, “Peraturan Walikota (Perwali) Kota Medan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Medan” (2018), https://peraturan.bpk.go.id/Download/251760/perwa_kota_medan_no.13_thn_2018_ok.pdf.

mengawasi, dan memastikan bahwa bansos tersalurkan sesuai sasaran dan prinsip *good governance*. Regulasi-regulasi ini sekaligus menjadi kerangka normatif penting yang mendasari praktik pencatatan dan pelaporan bantuan sosial, termasuk dalam konteks digitalisasi melalui *E-Bansos*.

d. Transaksi Elektronik

1) Konsep dan Dasar Hukum Transaksi Elektronik

Transaksi Elektronik menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Definisi ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁵⁸ Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pengakuan sahnyanya transaksi yang dilakukan secara digital di Indonesia, menegaskan bahwa setiap aktivitas hukum atau pertukaran informasi yang menggunakan sarana elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi konvensional.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan UU ITE tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE

⁵⁸ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Republik Indonesia § (2008), [https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202008.pdf).

2019), yang menggantikan PP Nomor 82 Tahun 2012.⁵⁹ Peraturan ini mengatur lebih rinci mengenai mekanisme penyelenggaraan sistem elektronik, kewajiban penyedia layanan digital, serta aspek keamanan dan integritas dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Melalui PP ini, Pemerintah menegaskan bahwa transaksi elektronik hanya dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan melalui sistem elektronik yang andal, aman, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu ketentuan penting dalam PP 71/2019 terdapat pada Pasal 1 angka 2, yang kembali menegaskan definisi transaksi elektronik sekaligus memperluas cakupan penerapannya, termasuk pada aktivitas layanan publik, pemerintahan, maupun sektor sosial.⁶⁰ selain mendefinisikan transaksi elektronik, peraturan ini juga menetapkan kewajiban hukum bagi penyelenggara sistem elektronik, yaitu untuk menjamin keamanan data, menjaga kerahasiaan informasi pengguna, serta menjamin keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) data dalam setiap aktivitas digital. Kewajiban ini menjadi krusial bagi lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial, yang dalam pelaksanaan program E-Bansos menggunakan sistem berbasis elektronik untuk mencatat, menyalurkan, dan melaporkan dana bantuan sosial.

⁵⁹ Sekretariat Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. 185, Republik Indonesia (2019), https://peraturan.bpk.go.id/Download/112816/PP_Nomor_71_Tahun_2019.pdf.

⁶⁰ Republik Indonesia.

Dengan adanya regulasi tersebut, transaksi yang terjadi dalam sistem E-Bansos memperoleh legitimasi hukum yang sama dengan transaksi konvensional, selama dilakukan melalui sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan, keandalan, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam UU ITE dan PP 71/2019.⁶¹ Hal ini menunjukkan bahwa kerangka hukum transaksi elektronik telah mendukung pelaksanaan digitalisasi akuntansi di sektor publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan bantuan sosial berbasis digital.

2) Teori yang Mendasari Transaksi Elektronik Dalam Sektor Publik

a) Teori Akuntabilitas Publik

Teori Akuntabilitas Publik menekankan bahwa lembaga pemerintah memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat.⁶² Dalam konteks transaksi elektronik, teori ini menjelaskan bagaimana penggunaan sistem digital memperkuat

transparansi dan keandalan pelaporan keuangan publik. Melalui digitalisasi, setiap transaksi terekam secara *real-time* dan dapat diaudit secara elektronik, sehingga meminimalkan peluang penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap

⁶¹ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Pub. L. No. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024.pdf>, Republik Indonesia 1 (2024).

⁶² Ratna Sari and Muslim Muslim, “Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review,” *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 3, no. 2 (2023): 90–106, <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>.

lembaga pemerintah. Dalam pelaksanaan E-Bansos, teori ini sangat relevan karena seluruh alur distribusi dana bantuan sosial dapat dipantau dan diverifikasi melalui sistem akuntansi digital.

b) Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*)

Teori Difusi Inovasi (*Diffusion of Innovation Theory*) yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers digunakan untuk menjelaskan bagaimana inovasi teknologi - seperti transaksi elektronik - diadopsi oleh organisasi atau individu.⁶³ Rogers mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi tingkat adopsi inovasi, yaitu *relative advantage* (keunggulan relatif), *compatibility* (kesesuaian), *complexity* (kerumitan), *trialability* (kemungkinan dicoba), dan *observability* (dapat diamati). Dalam konteks sektor publik, teori ini membantu memahami bagaimana instansi seperti Dinas Sosial mengadopsi sistem transaksi elektronik sebagai bagian dari transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Dengan demikian, penerapan transaksi elektronik di lingkungan pemerintahan tidak hanya sekadar perubahan teknis, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma menuju tata kelola berbasis teknologi. Ketiga teori tersebut secara bersama-sama menjelaskan bahwa transaksi elektronik memiliki dimensi sistemik (melalui SIA), normatif (melalui akuntabilitas publik),

⁶³ Ismail Sahin, "Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology-Related Studies Based on Rogers' Theory," *The Turkish Online Journal of Educational Technology* 5, no. 2 (2006): 1303–6521.

dan adaptif (melalui difusi inovasi), yang semuanya berperan penting dalam mendukung efektivitas implementasi E-Bansos sebagai bentuk nyata digitalisasi akuntansi sektor publik.

3) Hubungan Transaksi Elektronik dengan Sistem E-Bansos

Transaksi elektronik memiliki hubungan yang sangat erat dengan penerapan sistem informasi akuntansi berbasis digital dalam penyaluran dana bantuan E-Bansos. Dalam konteks ini, transaksi elektronik berfungsi sebagai input utama dalam sistem akuntansi digital, di mana setiap proses penyaluran, penerimaan, dan pelaporan dana bantuan direkam melalui sistem elektronik yang terintegrasi.⁶⁴ Dengan adanya digitalisasi transaksi, proses administrasi keuangan menjadi lebih transparan dan efisien karena setiap aktivitas keuangan terekam secara real-time dan dapat diaudit secara digital.

Secara konseptual, keterkaitan antara transaksi elektronik dan sistem E-Bansos mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik

dan transparansi digital sebagaimana diuraikan dalam teori akuntansi sektor publik.⁶⁵ Melalui sistem ini, pemerintah dapat meminimalkan potensi penyimpangan karena setiap transaksi memiliki audit trail yang dapat ditelusuri. Selain itu, penggunaan sistem elektronik memperkuat keandalan laporan keuangan serta mempercepat proses evaluasi kebijakan bantuan sosial berbasis data (*data driven decision making*).

⁶⁴ Dharmawati et al., *Sist. Inf. Akunt.*

⁶⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18th Ed.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transaksi elektronik bukan hanya mendukung efektivitas sistem akuntansi digital, tetapi juga menjadi pondasi utama terwujudnya tata kelola keuangan publik yang transparan, efisien, dan akuntabel melalui implementasi E-Bansos. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma dari sistem administrasi manual menuju sistem berbasis teknologi informasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tuntutan akuntabilitas pemerintahan modern.⁶⁶

e. Akuntabilitas dalam Perspektif Syariah

Akuntabilitas dalam perspektif syariah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep akuntabilitas dalam akuntansi konvensional. Dalam Islam, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada manusia atau institusi, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Konsep ini dikenal dengan dua dimensi pertanggungjawaban, yaitu *hablum minallah* (pertanggungjawaban kepada Allah) dan *hablum minannas* (pertanggungjawaban kepada sesama manusia). Setiap amanah yang diberikan, khususnya dalam pengelolaan dana publik dan bantuan sosial, akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.⁶⁷

⁶⁶ Rusdi Akbar, "Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas Publik Di Indonesia Studi Awal Di Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik* 1, no. 1 (2018): 1–16, <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>.

⁶⁷ Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): h.18, <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395>.

Prinsip amanah menjadi landasan utama dalam akuntabilitas syariah. Amanah mengandung makna kepercayaan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara jujur, adil, dan profesional. Allah SWT memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang menekankan kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Selain itu, konsep hisab atau perhitungan amal juga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam Islam, di mana setiap perbuatan manusia akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.⁶⁸

Dalam konteks kepemimpinan dan pengelolaan dana publik, Rasulullah SAW juga memberikan peringatan tegas melalui hadis yang menyatakan bahwa seorang pemimpin yang menipu rakyatnya akan mendapatkan balasan yang berat di akhirat. Hadist tersebut menegaskan bahwa pengelola dana umat memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar untuk menjaga kejujuran dan keadilan dalam menjalankan amanah. Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban etis dan religius.⁶⁹

Prinsip akuntabilitas dalam perspektif syariah menuntut adanya pertanggungjawaban yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Akuntabilitas dipahami sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur dan profesional agar

⁶⁸ Azwar, "Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam," *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22, <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592>.

⁶⁹ Eny Zuhrotin Nasyi'ah et al., "A Critical Review Of Accountability From The Islamic Perspective: Phenomena, Position, And Alignment Of Methodology," *The International Journal of Accounting and Business Society* 30, no. 2 (2022).

tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Dalam kajian ekonomi Islam kontemporer, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan kualitas pengelolaan layanan dan sistem yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Qoriani yang menunjukkan bahwa strategi pelayanan dan pengelolaan sistem yang baik berpengaruh terhadap peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah pada lembaga keuangan syariah, sehingga memperkuat posisi akuntabilitas sebagai fondasi penting dalam tata kelola ekonomi Islam.⁷⁰

Kaitannya dengan pengelolaan bantuan sosial berbasis digital seperti aplikasi E-Bansos, prinsip akuntabilitas syariah tercermin dalam tanggung jawab pengelola sistem terhadap keakuratan data penerima bantuan, ketepatan penyaluran, serta kelengkapan dan kejelasan pelaporan bantuan sosial. Sistem E-Bansos berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan amanah tersebut melalui pencatatan dan pengendalian yang terintegrasi. Dengan adanya sistem digital, proses pertanggungjawaban menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi, sehingga mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.⁷¹

f. Transparansi dalam Prespektif Syariah

⁷⁰ Hersa Farida Qoriani, "Strategy In Improving Study Customers: Baktimakmur Indah Surabaya Rural Bank (BPRS)," *International Journal of Management and Business Economics* 2, no. 1 (2024): 18–21, <https://doi.org/10.58540/ijmebe.v2i1.206>.

⁷¹ Siti Amerieska, Gugus Irianto, and Diedied P Affandy, "Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 27–39.

Transparansi dalam perspektif syariah merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola keuangan dan pengelolaan dana publik yang berlandaskan nilai kejujuran dan keterbukaan. Dalam akuntansi syariah, transparansi dimaknai sebagai penyampaian informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Wahyuni dan Yashari menegaskan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan syariah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan dapat dipahami, diverifikasi, serta mencerminkan kondisi yang sesungguhnya, sehingga mencegah terjadinya asimetri informasi dan praktik manipulatif. Prinsip ini menempatkan transparansi bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan bagian dari kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.⁷²

Landasan normatif transparansi dalam Islam dapat ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan rinci. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong adanya dokumentasi yang sistematis guna menjamin kejelasan hak dan kewajiban setiap pihak. Zamrizal dalam kajian sistematisnya menjelaskan bahwa prinsip transparansi dalam laporan keuangan syariah bertujuan untuk menjaga keadilan, mencegah sengketa, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana.

⁷² Wahyuni and Fadly Yashari Soumena, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 112–22, <https://doi.org/10.21580/economica.2023.6.1.1234>.

Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.⁷³

Dalam praktik kelembagaan Islam, transparansi juga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian Indrarini menunjukkan bahwa tingkat transparansi laporan keuangan pada lembaga amil zakat berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan pemberi dana (muzaki). Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan penyaluran dana menjadi faktor utama dalam menilai kredibilitas lembaga syariah. Hal ini menegaskan bahwa transparansi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan moral yang kuat dalam perspektif syariah.⁷⁴

Selain kajian normatif mengenai transparansi sebagai wujud keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan syariah, praktik pengelolaan dana sosial di Indonesia juga menunjukkan peran penting lembaga pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah artikel ilmiah oleh Hersa Farida Qoriaini dan M. Taqwa Choiruzzady, peran Kementerian Agama dalam pengawasan dan pembinaan pengelolaan zakat dan wakaf memiliki konsekuensi langsung terhadap peningkatan keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana tersebut,

⁷³ Niken Ardelia Zamrizal, Izzah Sholehah, and Azzah Nabila, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis," *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2025): 18–33, <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>.

⁷⁴ Rachma Indrarini and Aditya Surya Nanda, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah," *Akrual: Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 166–78, <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>.

sehingga mendukung peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem filantropi syariah yang berjalan.⁷⁵

Transparansi dalam pengelolaan keuangan syariah juga tidak dapat dipisahkan dari peran sistem dan mekanisme pengendalian internal. Erwanni menjelaskan bahwa penerapan akuntansi syariah yang didukung oleh sistem informasi yang memadai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Sistem pencatatan yang terstruktur memungkinkan proses pengelolaan dana dapat ditelusuri dan diawasi dengan lebih baik, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan demikian, transparansi dalam perspektif syariah tidak hanya bergantung pada integritas individu, tetapi juga diperkuat melalui sistem yang mendukung keterbukaan dan pengawasan.⁷⁶

Secara konseptual, transparansi dalam perspektif syariah merupakan prinsip yang melekat dalam tata kelola keuangan Islam dan menjadi prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas dan keadilan.

Ramadhani dan Rahman melalui tinjauan literturnya menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam pengelolaan dana berbasis syariah. Penerapan transparansi yang konsisten akan memperkuat legitimasi lembaga,

⁷⁵ Hersa Farida Qoriaini and M Taqwa Choiruzzady, “Peran Kementrian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 703–6, <https://doi.org/10.1515/9783110812220.bm>.

⁷⁶ Octaviar Wilmar Erwanni et al., “Peran Akutansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Di Bank Syariah Octaviar,” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 31–42.

meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷⁷

Akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur formal, tetapi juga memerlukan landasan etika dan spiritual yang kuat dari pelaksana kebijakan. Kesadaran moral dan spiritual berperan penting dalam mencegah terjadinya moral hazard serta perilaku manipulatif dalam pengelolaan sumber daya. Rifai menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai spiritual dan etika Islam mampu menjadi mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam membentuk perilaku jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga penerapan akuntabilitas dan transparansi dapat berjalan secara lebih optimal.⁷⁸

g. Prinsip Keadilan dan Ketepatan Sasaran dalam Islam

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan nilai fundamental dalam Islam yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan distribusi dana publik.

Keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan porsinya, serta memberikan manfaat kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, khususnya dalam distribusi bantuan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan

⁷⁷ Fidya Puji Ramadhani and Taufiqur Rahman, "Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Pensiun Syariah: Sebuah Tinjauan Sistematis Literatur," *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2020): 180–94.

⁷⁸ Khamdan Rifai, "How to Reduce Moral Hazard Crisis in Business: Study from Indonesian's Pesantren," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 1 (2023): 62–71, <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i1.109>.

sosial. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan umat.⁷⁹

Ketepatan sasaran dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan tujuan kemaslahatan (*maqashid al-shariah*). QS. At-Taubah ayat 60 secara eksplisit menyebutkan golongan penerima zakat (*mustahiq*), yang menunjukkan bahwa distribusi dana sosial harus dilakukan secara selektif dan berbasis kriteria yang jelas agar tidak terjadi salah sasaran. Inovasi dalam distribusi zakat yang mengikuti penafsiran QS. At-Taubah ayat 60 menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak sekadar berbagi harta, tetapi pengelolaan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Syarifuddin dan Trimulato juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahiq melalui zakat yang dikelola secara adil dan transparan memberikan dampak positif terhadap inklusi sosial dan pengurangan ketimpangan masyarakat. Pendekatan manajemen zakat yang mengikuti nilai-nilai syariah dan *maqashid syariah* menjadikan distribusi zakat tepat sasaran sesuai dengan prinsip keadilan Islam.⁸⁰

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran dana sosial sering kali disebabkan oleh kelemahan dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat. Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan karena

⁷⁹ Rizky Andriati and Nurul Huda, "The Influences of Productive Zakah Mentoring To Saving Behavior and The Prosperity of Poor Housewife," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 207–16, <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i2.1698>.

⁸⁰ Uswatun Hasanah, Harisah, and Mohammad Ali Al Humaidy, "Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity by Applying Tafsir Qs. At-Taubah Verse 60," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 32, no. 3 (2021): 167–86.

dana yang seharusnya diterima oleh pihak yang berhak justru berpotensi salah sasaran. Penelitian oleh Syarifuddin dan Trimulato menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat yang tidak didukung oleh data yang akurat akan menghambat tercapainya tujuan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana sosial menurut prinsip keadilan Islam.⁸¹

Seiring perkembangan teknologi, penerapan sistem informasi dalam pengelolaan dana sosial Islam dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Sistem berbasis digital memungkinkan proses pendataan dan pemutakhiran data penerima dilakukan secara lebih objektif dan berkelanjutan. Penelitian oleh Hasanah menjelaskan bahwa inovasi distribusi dana zakat yang berbasis pada penafsiran QS. At-Taubah ayat 60 mampu memperbaiki mekanisme penentuan penerima bantuan agar lebih tepat sasaran. Dengan demikian, pemanfaatan sistem dan inovasi distribusi menjadi sarana pendukung untuk mewujudkan prinsip keadilan dan maslahah dalam Islam.⁸²

Dengan demikian, prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dalam Islam menuntut pengelolaan dana sosial yang berlandaskan amanah, kejelasan kriteria penerima, akurasi data, serta dukungan sistem

⁸¹ Syarifuddin and Trimulato, "Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia," *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 83–99, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4405>.

⁸² Fauzan et al., "Model Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 1–14.

pengelolaan yang terstruktur agar distribusi bantuan benar-benar memberikan kemaslahatan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi Sistem E-Bansos dalam penyaluran dana bantuan sosial. Implementasi E-Bansos merupakan fenomena kebijakan publik yang melibatkan aktivitas administratif, penggunaan sistem informasi, serta interaksi antar pelaksana di tingkat daerah. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat untuk menangkap realitas lapangan secara komprehensif dibandingkan pendekatan kuantitatif.

Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁸³ Pendekatan ini relevan karena penelitian E-Bansos tidak bertujuan menguji hipotesis atau menghitung pengaruh antar variabel, melainkan memahami bagaimana kebijakan dan sistem elektronik tersebut dijalankan dalam praktik di lapangan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pemahaman, serta praktik kerja para pelaksana yang terlibat langsung dalam pendataan, verifikasi, penyaluran, dan pelaporan bantuan

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

sosial. Data yang dikumpulkan berupa narasi hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta dokumen pendukung implementasi E-Bansos. Melalui data tersebut, peneliti dapat menangkap realitas empiris sebagaimana terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

Creswell menyatakan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami suatu fenomena secara holistik dengan menempatkan perspektif partisipan sebagai sumber utama data.⁸⁴ Implementasi E-Bansos tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diadaptasi, dan dijalankan oleh para pelaksana kebijakan di tingkat daerah.

Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi empiris implementasi E-Bansos. Penelitian ini tidak memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap objek penelitian, melainkan memaparkan bagaimana proses pendataan, verifikasi, penyaluran, serta pencatatan dan pelaporan bantuan sosial dilakukan melalui sistem elektronik.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian.⁸⁵ Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengamati dan mendeskripsikan implementasi E-Bansos

⁸⁴ John W Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

berdasarkan data lapangan, tanpa melakukan pengujian hubungan sebab akibat atau pengukuran statistik.

Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mengaitkan temuan lapangan dengan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam akuntansi sektor publik. Melalui deskripsi proses implementasi E-Bansos, dapat dianalisis bagaimana sistem elektronik mendukung keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial oleh pemerintah daerah.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi Sistem E-Bansos serta implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan, pendataan, verifikasi, penyaluran, serta pelaporan bantuan sosial kepada masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan Sistem E-Bansos dalam mendukung proses administrasi bantuan sosial berbasis digital, sehingga relevan dengan fokus penelitian

Pemilihan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai pelaksana utama kebijakan bantuan sosial di tingkat daerah, sehingga menjadi sumber data yang otoritatif dan relevan untuk mengkaji implementasi E-Bansos.
2. Telah menerapkan sistem elektronik dalam pengelolaan bantuan sosial, seperti penggunaan aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS, yang memungkinkan penelitian dilakukan secara operasional dan berbasis praktik lapangan.
3. Kabupaten Banyuwangi ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah percontohan (*pilot project/living lab*) dalam penerapan inovasi pelayanan publik dan transformasi digital pemerintahan, termasuk dalam sektor pelayanan sosial, sehingga memberikan konteks penelitian yang strategis dan aktual.

C. Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive* merupakan cara penentuan subjek penelitian dengan pertimbangan bahwa subjek tersebut dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.⁸⁶ Pendekatan ini digunakan dalam penelitian

⁸⁶ Sugiyono.

kualitatif karena penelitian tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena.

Penggunaan *purposive* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan aplikasi PERLINSOS hanya dipahami secara komprehensif oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan sosial. Oleh karena itu, tidak semua individu dapat dijadikan subjek penelitian, melainkan hanya mereka yang memiliki pengalaman empiris dan pengetahuan praktis terkait sistem tersebut. Creswell menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti secara sengaja memilih individu yang dapat memberikan informasi paling kaya sesuai dengan fokus penelitian.⁸⁷

Berdasarkan pertimbangan tersebut, subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri atas pendamping bantuan sosial (pendamping bansos) dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Banyuwangi. Subjek-subjek ini dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam proses pendataan, verifikasi, penyaluran, serta pemanfaatan bantuan sosial yang dikelola melalui SIKS-NG dan PERLINSOS.

Adapun informan penelitian dan karakteristiknya adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

a. Pendamping Bantuan Sosial (*Key Informan*)

Pendamping bansos ditetapkan sebagai informan kunci karena berperan langsung dalam pendataan dan verifikasi calon penerima manfaat, pendampingan penerima bantuan, serta pemutakhiran data bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS. Pendamping bansos memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme implementasi sistem dan pelaksanaan bantuan sosial berbasis sistem elektronik di lapangan.

b. Penerima Manfaat PKH dan BPNT (*Informan Pendukung*)

Penerima manfaat PKH dan BPNT dipilih sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai proses penerimaan bantuan sosial, kesesuaian data penerima, serta mekanisme penyaluran bantuan yang tercatat dalam SIKS-NG dan PERLINSOS. Informasi dari informan ini digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari pendamping bansos.

Dengan susunan subjek penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data mengenai mekanisme dan proses implementasi SIKS-NG dan PERLINSOS, baik dari sisi pelaksana di lapangan maupun dari sisi penerima bantuan, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

Dengan susunan subjek penelitian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengumpulan data mengenai mekanisme dan proses implementasi

SIKS-NG dan PERLINSOS, baik dari sisi pelaksana di lapangan maupun dari sisi penerima bantuan, sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data diarahkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai proses, aktivitas, serta konteks lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan subjek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan proses pengelolaan bantuan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan aplikasi PERLINSOS. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pendamping bantuan sosial sebagai informan kunci dan penerima manfaat PKH serta BPNT sebagai informan pendukung. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Moleong mendefinisikan wawancara sebagai

percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan informan, untuk memperoleh informasi secara mendalam.⁸⁸ Dalam penelitian kualitatif, wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan, namun tetap memberi ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan konteks dan respons informan. Wawancara dilakukan kepada pendamping bantuan sosial untuk memperoleh data mengenai proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS, serta kepada penerima manfaat PKH dan BPNT untuk memperoleh data mengenai proses penerimaan dan penyaluran bantuan sosial.

Penggunaan wawancara relevan dalam penelitian ini karena banyak informasi mengenai mekanisme kerja dan pelaksanaan bantuan sosial yang hanya dapat diperoleh melalui penjelasan langsung dari informan. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali data yang bersifat mendalam dan kontekstual sesuai dengan fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap

⁸⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

aktivitas, proses, dan situasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengamati perilaku, proses kerja, dan aktivitas manusia dalam kondisi yang sebenarnya.⁸⁹ Observasi memungkinkan peneliti memahami fenomena penelitian secara nyata dan kontekstual.

Dalam penelitian kualitatif, Spradley mengemukakan bahwa observasi dilakukan secara bertahap melalui observasi deskriptif, observasi terfokus, dan observasi terseleksi. Ketiga bentuk observasi tersebut digunakan dalam penelitian ini, dengan penjelasan sebagai berikut:⁹⁰

1) Observasi Deskriptif

Observasi deskriptif dilakukan pada tahap awal penelitian untuk memperoleh gambaran umum mengenai situasi dan kondisi lapangan. Pada tahap ini, peneliti mengamati secara luas aktivitas pendamping bantuan sosial, lingkungan kerja, serta proses umum

pengelolaan bantuan sosial yang berkaitan dengan penggunaan SIKS-NG dan PERLINSOS. Observasi ini bertujuan untuk memahami konteks penelitian secara menyeluruh.

2) Observasi Terfokus

Observasi terfokus dilakukan setelah peneliti memperoleh gambaran umum melalui observasi deskriptif. Pengamatan diarahkan pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan fokus

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

⁹⁰ James P Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980).

penelitian, seperti proses pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh pendamping bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS.

3) Observasi Terseleksi

Observasi terseleksi dilakukan secara lebih spesifik dan selektif terhadap aktivitas tertentu yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, pengamatan diarahkan pada prosedur dan mekanisme kerja tertentu, seperti alur kerja pendamping bantuan sosial dalam melakukan input dan pembaruan data bantuan sosial.

Penggunaan ketiga bentuk observasi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman lapangan secara sistematis dan bertahap sesuai dengan fokus penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Creswell menyatakan bahwa dokumen merupakan sumber data penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memberikan informasi yang bersifat tertulis, sistematis, dan relatif stabil.⁹¹ Dokumen digunakan sebagai sumber data pendukung dalam penelitian.

⁹¹ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial, seperti data penerima manfaat PKH dan BPNT, pedoman atau petunjuk penggunaan SIKS-NG dan PERLINSOS, serta catatan administratif yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan mendukung data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Penggunaan dokumentasi relevan karena dapat memberikan data tertulis yang membantu peneliti memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan bantuan sosial secara lebih sistematis.

Dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan, peneliti berupaya memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai proses pengelolaan bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS.

E. Analisis data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan dan penafsiran data yang diperoleh dari lapangan agar data tersebut tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan sampai penelitian selesai. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara

terus-menerus sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan.⁹²

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pengelolaan bantuan sosial melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan aplikasi PERLINSOS. Data yang diperoleh berupa data naratif, catatan lapangan, dan dokumen pendukung yang kemudian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹³ Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara saling berkaitan dan berulang selama proses penelitian berlangsung.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih terorganisasi. Miles, Huberman, dan Saldaña menjelaskan bahwa reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian serta mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu agar lebih

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

⁹³ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

mudah dianalisis. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menelaah hasil wawancara dengan pendamping bantuan sosial serta penerima manfaat, hasil observasi terhadap penggunaan aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS, serta dokumen yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Data-data tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian yang meliputi implementasi sistem elektronik bansos, transparansi informasi bantuan sosial, serta akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap penyusunan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks untuk membantu peneliti melihat pola serta hubungan antar data. Dalam

penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang disusun secara sistematis berdasarkan temuan lapangan terkait implementasi sistem SIKS-NG dan PERLINSOS dalam proses pendataan, verifikasi, serta pelayanan bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Penyajian data juga memuat informasi mengenai proses penggunaan sistem oleh pendamping bansos serta mekanisme pelayanan kepada penerima manfaat sehingga memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara sistem

elektronik bansos dengan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap pemberian makna terhadap data yang telah dianalisis dan disajikan. Miles, Huberman, dan Saldaña menyatakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan proses analisis data yang berlangsung. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi sistem elektronik bansos melalui aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan temuan penelitian yang berkaitan dengan implementasi sistem, transparansi informasi bantuan sosial, serta akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif bersifat valid dan dapat dipercaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data menjadi aspek penting karena data yang dikumpulkan sangat bergantung pada interaksi antara peneliti dan subjek penelitian.

Sugiyono menjelaskan bahwa pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menjamin tingkat kepercayaan data yang diperoleh dari lapangan.⁹⁴ Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan teknik tertentu agar data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari kondisi lapangan. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri sebagai pembandingan terhadap data yang diperoleh. Moleong menyatakan bahwa triangulasi digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif.⁹⁵ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan

dan mengecek kembali data yang diperoleh dari pendamping bantuan sosial sebagai informan kunci dengan data yang diperoleh dari penerima manfaat PKH dan BPNT sebagai informan pendukung.

Perbandingan data dari berbagai sumber ini dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang berkaitan dengan proses pengelolaan bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS.

b. Triangulasi Teknik

⁹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

⁹⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara dicek kembali dengan hasil observasi lapangan serta dokumen pendukung yang relevan. Dengan triangulasi teknik, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu teknik pengumpulan data, sehingga tingkat kepercayaannya menjadi lebih kuat.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi dan kestabilan informasi yang diperoleh. Sugiyono menjelaskan bahwa triangulasi waktu digunakan karena kondisi dan situasi subjek penelitian dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga pengumpulan data pada waktu yang berbeda dapat meningkatkan tingkat kepercayaan data.⁹⁶ Dalam penelitian ini, triangulasi waktu dilakukan

dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap informan penelitian pada waktu yang berbeda selama proses penelitian berlangsung.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, peneliti berupaya menjaga keabsahan data agar sesuai dengan kondisi lapangan dan fokus penelitian mengenai proses pengelolaan bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS.

⁹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti secara sistematis sejak sebelum memasuki lapangan hingga tahap analisis data. Pembagian tahap penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran alur pelaksanaan penelitian secara terstruktur dan terencana sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.

Dalam penelitian ini, tahap-tahap penelitian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan tahap awal sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan penentuan fokus penelitian, penyusunan proposal penelitian, serta kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

Pada tahap pra-lapangan, peneliti juga mengurus perizinan penelitian kepada instansi terkait, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, sebagai lokasi penelitian. Persiapan ini dilakukan agar pelaksanaan penelitian di lapangan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

b. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan tahap pelaksanaan penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan kepada pendamping bantuan sosial sebagai informan kunci dan penerima manfaat PKH serta BPNT sebagai informan pendukung.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pengelolaan bantuan sosial melalui SIKS-NG dan PERLINSOS, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa dokumen yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap dan berulang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara berkelanjutan hingga penelitian selesai. Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan model analisis data kualitatif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori dan tema sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Melalui ketiga tahap penelitian tersebut, penelitian ini dilaksanakan secara terstruktur dan sesuai dengan pendekatan kualitatif yang digunakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil

Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan bidang sosial. Awal pembentukannya berakar dari keberadaan Kantor Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur, yang berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti penyesuaian kelembagaan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, yang menjadi dasar hukum pembentukan Unit Pelaksana Daerah (UPD) di lingkungan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan regulasi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi secara resmi berdiri sendiri dan menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pada masa itu, fungsi sosial berada dalam satu rumpun kelembagaan dengan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur.

Seiring dengan perkembangan organisasi pemerintahan, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nomenklatur. Untuk wilayah Banyuwangi, awalnya dibentuk Departemen Sosial Daerah Banyuwangi, yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial, dan selanjutnya menjadi Kantor Departemen Sosial, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2009, ketika lembaga ini bertransformasi menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertran), ditandai dengan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang sama.

Pada tahun 2011, dilakukan penyesuaian kembali melalui Unit Pelaksana Daerah (UPD), di mana bidang sosial dan kepahlawanan digabung menjadi satu unit kelembagaan. Transformasi kelembagaan

terus berlangsung hingga diterbitkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan ini menandai perubahan struktur organisasi yang berlaku hingga saat ini, dengan penguatan fungsi di bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga melalui berbagai program strategis berbasis digital.

2. Visi dan Misi Instansi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi arah pembangunan daerah. Visi tersebut menggambarkan cita-cita dan arah kebijakan pembangunan sosial di wilayah Banyuwangi, sedangkan misi berfungsi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut melalui berbagai program kerja dan kegiatan.

Visi:

**“Terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan
berkah.”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial, diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual.

Misi:

- 1) Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan serta memperkuat ketahanan lingkungan.
- 2) Membangun sumber daya manusia unggul berkarakter serta menciptakan harmonisasi sosial yang kondusif di seluruh lapisan masyarakat.

Melalui visi dan misi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat rentan, serta penguatan sistem akuntabilitas publik yang berbasis digital, termasuk dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Elektronik (E-Bansos).

3. Tugas Pokok dan Fungsi DINSOSPPKB Kabupaten Banyuwangi

Sebagai instansi yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi melaksanakan berbagai program bantuan sosial baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Program-program tersebut diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, memperkuat perlindungan sosial, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang inklusif.

Beberapa program utama yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1) Program Keluarga Harapan (PKH)

Merupakan program bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat tertentu, seperti pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta kesejahteraan lansia dan disabilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

2) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Program ini memberikan bantuan pangan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warong (elektronik warung gotong royong). Melalui sistem ini, bantuan disalurkan secara lebih transparan dan tepat sasaran.

3) Bantuan Sosial Tunai (BST)

Diberikan kepada masyarakat miskin yang terdampak kondisi darurat, seperti pandemi atau bencana sosial lainnya, guna menjaga daya beli dan keberlangsungan hidup rumah tangga miskin.

4) Program Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia

Bertujuan memberikan perlindungan sosial, perawatan, serta bantuan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, lansia terlanter, dan kelompok rentan sosial lainnya.

5) Bantuan Bencana Sosial dan Alam

Berupa bantuan tanggap darurat, logistik, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat terdampak bencana alam maupun sosial. Program ini dilaksanakan bekerja sama dengan BPBD dan instansi terkait lainnya.

6) Program Penanganan Anak Terlantar dan Balita dari Keluarga Rentan

Menyediakan bantuan gizi, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial yang tidak layak.

7) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Diperuntukkan bagi keluarga miskin yang memiliki potensi usaha kecil. Bantuan ini berupa modal usaha, pelatihan, dan pendampingan agar penerima mampu mandiri secara ekonomi.

8) Bantuan untuk Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu

Bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar serta keberlanjutan pendidikan anak-anak yang kehilangan orang tua. Sasaran program ini adalah anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau diusulkan oleh desa/kelurahan.

Selain program nasional di atas, Dinas Sosial Kabupaten

Banyuwangi juga mengembangkan sejumlah program lokal daerah yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Banyuwangi, antara lain:

1) Program “Banyuwangi Peduli”

Program bantuan sosial daerah yang menysasar warga miskin non-DTKS hasil verifikasi lapangan, terutama masyarakat terdampak sosial ekonomi yang tidak terjangkau oleh bantuan pusat.

2) Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Daerah

Memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada keluarga miskin yang memiliki usaha mikro, agar mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan tunai.

3) Program Bantuan Berbasis Komunitas

Diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), panti asuhan, serta kelompok sosial seperti Karang Werda dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial. Tujuannya untuk memperkuat peran komunitas dalam penanganan masalah sosial di tingkat lokal.

4. Struktur Organisasi Instansi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan

Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan unsur pelaksana teknis. Struktur organisasi ini disusun untuk memastikan terlaksananya seluruh program kerja yang mencakup bidang kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan keluarga secara efektif dan terkoordinasi.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi DINSOSPPKB
Sumber: DINSOSPPKB

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Sistem Elektronik Bansos (E - Bansos) dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi Sistem E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan melalui penggunaan sistem digital yang mendukung proses pendataan, verifikasi, serta pelayanan kepada

penerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan selama penelitian, pelaksanaan sistem tersebut memanfaatkan dua aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan data dan pelayanan bantuan sosial, yaitu Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan PERLINSOS.⁹⁷

Kedua sistem tersebut digunakan pada tahapan yang berbeda dalam proses pelayanan bantuan sosial. SIKS-NG digunakan untuk

⁹⁷ Observasi di DINSOSPPKB Banyuwangi, 19 November 2025

pengelolaan data penerima manfaat, pemetaan pendamping sosial, serta pemutakhiran data administratif penerima bantuan. Sementara itu, PERLINSOS digunakan dalam proses pelayanan langsung kepada penerima manfaat, termasuk proses verifikasi identitas melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pengecekan status kepesertaan bantuan sosial.

Uraian implementasi sistem elektronik bansos dalam penelitian ini disajikan melalui beberapa tahapan, yaitu akses sistem dan otorisasi pengguna, proses pengelolaan data penerima manfaat, proses pelayanan kepada penerima manfaat, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan sistem tersebut.

a. Implementasi Sistem E-Bansos melalui SIKS – NG

1) Akses Sistem dan Otorisasi Pengguna

Implementasi Sistem E-Bansos melalui SIKS-NG di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi diawali dengan proses

akses sistem oleh petugas yang telah ditunjuk dan diberikan kewenangan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, akses terhadap sistem dilakukan secara daring (*online*) melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Sistem SIKS-NG diakses melalui laman resmi yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial.

Sebelum dapat masuk ke dalam sistem, pengguna diwajibkan memasukkan username dan password pada halaman

login. Halaman tersebut terdiri atas kolom identitas pengguna dan fitur autentikasi keamanan. Selain itu, pada tampilan awal juga terdapat identitas instansi serta informasi sistem yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut merupakan bagian dari sistem pengelolaan data kesejahteraan sosial.



Gambar 4.2
Tampilan Login Aplikasi SIKS-NG
Sumber : Aplikasi SIKS-NG

Berdasarkan pengamatan, setiap pengguna memiliki akun yang bersifat individual. Akun tersebut terdaftar atas nama petugas dan terhubung dengan wilayah atau tugas tertentu.

Proses login hanya dapat dilakukan apabila data yang dimasukkan sesuai dengan yang terdaftar dalam sistem. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian identitas, sistem tidak akan memberikan akses masuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping batuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, dijelaskan bahwa:

Akun itu sudah ditentukan dari pusat dan kabupaten, sehingga tidak dibuat secara mandiri oleh operator di

lapangan. Jadi masing-masing operator memiliki username sendiri yang bersifat personal dan tidak dapat digunakan oleh pihak lain. Penggunaan akun tersebut disesuaikan dengan tugas dan kewenangan masing-masing operator. Apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan password, maka sistem tidak dapat diakses.⁹⁸

Setelah proses login berhasil, sistem menampilkan halaman dashboard utama. Dashboard tersebut memuat informasi identitas pengguna yang sedang aktif, seperti nama akun dan wilayah kerja. Selain itu, terdapat beberapa menu navigasi yang tersusun secara sistematis pada bagian samping atau atas halaman, tergantung tampilan sistem yang digunakan.



Gambar 4.3

Tampilan Dashboard SIKS-NG

Sumber: Aplikasi SIKS-NG

Setelah proses login berhasil, sistem menampilkan halaman dashboard utama sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3 Pada bagian atas halaman terdapat keterangan wilayah kerja yang menunjukkan status pengguna sebagai Koordinator Kabupaten. Di bagian tengah layar muncul tampilan sambutan

⁹⁸ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.

dengan tulisan “Selamat Datang” yang disertai nama pengguna serta nomor identitas akun yang terdaftar dalam sistem.

Pada sisi sebelah kiri layar terdapat panel menu (*sidebar*) yang memuat beberapa fitur utama sistem. Menu tersebut tersusun secara vertikal dan mencakup beberapa pilihan seperti manajemen, mapping pendamping, usulan, serta menu lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan data kesejahteraan sosial. Struktur menu tersebut menunjukkan bahwa pengguna dapat mengakses berbagai fungsi sistem sesuai dengan peran dan kewenangan yang dimiliki.

Tampilan *dashboard* juga memperlihatkan identitas akun yang sedang aktif, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dalam sistem terhubung dengan akun pengguna tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, setiap menu dalam panel navigasi mengarahkan pengguna pada halaman kerja yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pengelolaan data bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping bansos, dijelaskan bahwa:

Kalau sudah masuk dashboard, kita bisa pilih menu sesuai tugas masing-masing. Di dalamnya sudah ada beberapa menu yang bisa diakses sesuai kebutuhan kerja. Misalnya kalau mau mapping pendamping atau mau cek usulan bantuan. Tinggal klik saja menu yang ada di

sebelah kiri. Jadi kita menyesuaikan saja mau buka menu yang mana sesuai tugas.⁹⁹

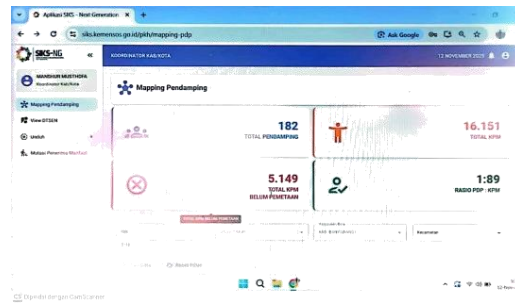
Tampilan dashboard tersebut menjadi halaman utama sebelum pengguna melakukan proses pengelolaan data penerima bantuan sosial dalam sistem SIKS-NG.

2) Proses Pengelolaan Data Penerima

Setelah pengguna mengakses dashboard utama sistem SIKS-NG, pengelolaan data penerima manfaat dilakukan melalui beberapa menu yang tersedia pada panel navigasi di sebelah kiri, yaitu *Mapping* Pendamping, *View* DTSN, dan Mutasi Penerima Manfaat.

Ketika pengguna memilih menu *Mapping* Pendamping, sistem menampilkan halaman yang memuat informasi mengenai jumlah pendamping sosial dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam wilayah kabupaten/kota. Pada bagian tengah layar terlihat beberapa indikator yang menunjukkan total pendamping, total KPM, jumlah KPM yang belum dilakukan pemetaan, serta rasio antara pendamping dan KPM.

⁹⁹ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.



Gambar 4.4
Menu Mapping Pendamping
Sumber: Aplikasi SIKS-NG

Selain informasi numerik, halaman tersebut juga menyediakan fitur penyaringan berdasarkan wilayah administratif seperti provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Melalui fitur tersebut, operator dapat menyesuaikan atau meninjau pembagian pendamping sosial terhadap penerima manfaat di wilayah tertentu.

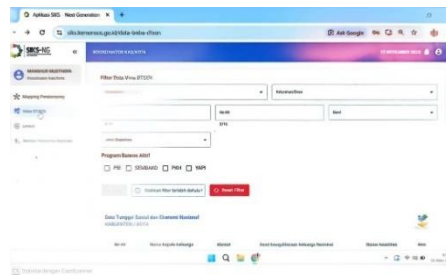
Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping bansos, dijelaskan bahwa:

Menu mapping itu untuk melihat jumlah pendamping dan KPM di tiap wilayah. Dari situ bisa kelihatan pendampingan di masing-masing kecamatan atau desa. Kalau ada wilayah yang datanya belum masuk atau belum terpetakan, biasanya langsung kelihatan di sistem. Nanti akan dicek lagi oleh pendamping terkait. Setelah itu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi di lapangan.¹⁰⁰

Setelah proses pemetaan pendamping, pengelolaan data dilanjutkan melalui menu *View DTSN*. Berdasarkan pengamatan, halaman ini menampilkan fitur filter data yang dapat digunakan untuk menelusuri penerima manfaat

¹⁰⁰ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.

berdasarkan kecamatan, kelurahan/desa, nomor induk kependudukan (NIK), serta kategori program bantuan sosial yang aktif.



Gambar 4.5
Tampilan Menu *View DTSN*
Sumber: Aplikasi SIKS-NG

Pada bagian bawah halaman, sistem menampilkan tabel data yang memuat informasi penerima manfaat, seperti nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, alamat, serta status kesejahteraan. Operator dapat menggunakan fitur pencarian atau filter untuk menampilkan data sesuai kebutuhan administratif.

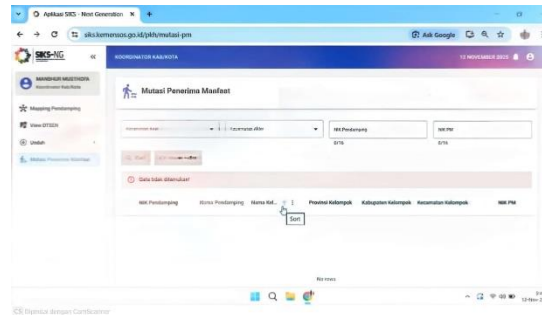
Sebagaimana disampaikan oleh pendamping bansos:

Kalau mau cek data penerima atau program yang aktif, biasanya pakai menu *View DTSN*. Di situ datanya bisa ditampilkan sesuai kebutuhan. Bisa difilter berdasarkan wilayah, seperti kecamatan atau desa. Selain itu juga bisa dipilih berdasarkan jenis bantuan yang diterima. Jadi tinggal sesuaikan saja data apa yang mau dilihat.¹⁰¹

Selain meninjau data, sistem juga menyediakan menu Mutasi Penerima Manfaat yang digunakan apabila terdapat

¹⁰¹ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.

perubahan data administratif penerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil observasi, ketika menu tersebut dibuka, sistem menampilkan formulir pencarian berdasarkan kecamatan, NIK pendamping, maupun NIK penerima manfaat.



Gambar 4.6
Tampilan Menu Mutasi Penerima Manfaat
Sumber: Aplikasi SIKS-NG

Pada halaman ini terdapat kolom pencarian serta tabel hasil data yang dapat diurutkan berdasarkan kategori tertentu. Apabila data yang dicari tidak ditemukan, sistem menampilkan keterangan pada bagian tabel. Proses mutasi dilakukan ketika terdapat perubahan kondisi administratif, seperti perpindahan wilayah atau penyesuaian kelompok penerima manfaat.

Berdasarkan keterangan pendamping bansos:

Mutasi digunakan kalau ada perubahan data penerima. Misalnya kalau penerima pindah wilayah, baik antar desa atau kecamatan. Bisa juga karena ada penyesuaian kelompok penerima bantuan. Perubahan itu kemudian dicatat melalui menu mutasi di sistem. Jadi data penerima tetap menyesuaikan kondisi yang terbaru.¹⁰²

¹⁰² Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.

Melalui menu *Mapping* Pendamping, *View* DTSN, dan Mutasi Penerima Manfaat, pengelolaan data penerima dalam sistem SIKS-NG dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing fitur yang tersedia pada *dashboard* sistem.

Selain digunakan untuk pengelolaan dan pemutakhiran data penerima manfaat, sistem SIKS-NG juga menghasilkan berbagai bentuk keluaran (*output*) yang berkaitan dengan data penerima dan pendamping sosial. Berdasarkan hasil observasi, *output* sistem ditampilkan dalam bentuk tabel data, rekapitulasi jumlah penerima manfaat, serta informasi statistik yang dapat diakses melalui menu tertentu dalam dashboard.

Pada menu *Mapping* Pendamping, sistem menampilkan ringkasan jumlah total pendamping, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM), jumlah KPM yang belum dilakukan pemetaan, serta rasio antara pendamping dan KPM dalam wilayah

kabupaten/kota. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk angka yang ditampilkan pada bagian tengah halaman *dashboard*.

Data yang ditampilkan pada halaman tersebut dapat berubah sesuai dengan filter wilayah yang dipilih oleh pengguna. Operator dapat meninjau jumlah penerima manfaat berdasarkan kecamatan atau wilayah administratif tertentu melalui fitur penyaringan yang tersedia.

Selain itu, pada menu *View* DTSN, sistem menampilkan daftar penerima manfaat secara rinci dalam bentuk tabel yang memuat informasi identitas dan status kepesertaan program bantuan sosial. Tabel tersebut dapat disaring berdasarkan jenis program bantuan, Informasi yang ditampilkan pada tabel meliputi nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, alamat, serta kategori kesejahteraan.

Berdasarkan keterangan informan, output data yang ditampilkan dalam sistem digunakan sebagai dasar dalam proses administrasi dan pemantauan data penerima manfaat:

Data yang muncul di sistem itu yang jadi acuan kita. Dari situ bisa dilihat jumlah penerima bantuan yang tercatat. Pembagian wilayah juga kelihatan berdasarkan data yang ada di sistem. Biasanya dicek per kecamatan atau desa. Jadi kita mengacu ke data yang tampil di sistem tersebut.¹⁰³

Selain tampilan tabel dan rekap jumlah penerima, sistem juga menyimpan riwayat perubahan data yang dilakukan melalui menu *Mutasi Penerima Manfaat*. Setiap perubahan yang diajukan melalui sistem tercatat berdasarkan akun pengguna yang sedang aktif pada saat proses tersebut dilakukan. Informasi yang tersimpan dalam sistem dapat ditampilkan kembali melalui pencarian data pada menu yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, data yang telah dimasukkan dan disimpan dalam sistem tidak memerlukan

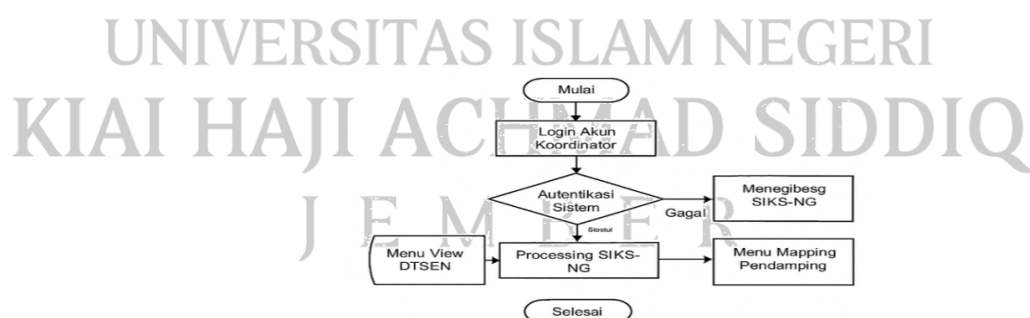
¹⁰³ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.

pencatatan manual tambahan karena seluruh proses pengelolaan dilakukan melalui aplikasi berbasis daring. Informasi yang ditampilkan pada sistem dapat diakses kembali selama pengguna memiliki hak akses yang sesuai.

Melalui tampilan rekapitulasi, tabel data penerima, serta pencatatan perubahan yang tersimpan dalam sistem, SIKS-NG menyediakan keluaran data yang berkaitan dengan pengelolaan penerima bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

3) Alur Bagan *Flowchart* Aplikasi SIKS-NG

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai tahapan penggunaan aplikasi SIKS-NG dalam pengelolaan data penerima manfaat, peneliti menyusun bagan alur proses berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pendamping bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 4.7

Flowchart Proses SIKS-NG

Sumber: Dibuat oleh Peneliti, 2025

Bagan alur tersebut menggambarkan tahapan penggunaan sistem mulai dari proses login sesuai hak akses pengguna, pemilihan menu yang digunakan dalam pengelolaan data, hingga tahapan pembaruan dan mutasi data penerima manfaat. Setiap tahapan disusun berdasarkan praktik penggunaan sistem yang dijelaskan oleh pendamping bantuan sosial selama penelitian berlangsung.

b. Implementasi Sistem E-Bansos melalui PERLINSOS

1) Akses Sistem dan *Login* Pengguna

Pelaksanaan Sistem E-Bansos pada tahap pelayanan penerima manfaat di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui Portal Agen PERLINSOS. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, petugas terlebih dahulu membuka laman Portal Agen PERLINSOS melalui perangkat yang terhubung dengan jaringan internet.

Pada halaman awal terlihat tampilan “Portal Agen PERLINSOS” dengan tombol “Masuk dengan IKD”. Di bagian bawah halaman tersedia informasi bantuan berupa *Call Center* dan *WhatsApp* yang dapat dihubungi apabila terjadi kendala dalam penggunaan sistem.



Gambar 4.8
Portal Agen PERLINSOS
Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Untuk dapat mengakses layanan, petugas memilih opsi “Masuk dengan IKD”. Sistem kemudian mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).



Gambar 4.9
Halaman Login Akun IKD
Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Pada tahap ini, pengguna diminta melakukan login akun IKD sebagai bagian dari proses autentikasi identitas digital. Proses login dilakukan dengan mengikuti instruksi yang tersedia pada layar hingga sistem menerima autentikasi pengguna dan mengizinkan akses ke tahap berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping bansos, dijelaskan bahwa:

Setiap pelayanan dimulai dengan login melalui IKD. Kalau belum login, data penerima memang tidak bisa dibuka di sistem. Jadi sebelum pelayanan dilakukan, login itu wajib. Login tersebut dilakukan oleh petugas yang bertugas saat itu. Setiap kali akan melaksanakan pelayanan, proses login harus dilakukan terlebih dahulu.¹⁰⁴

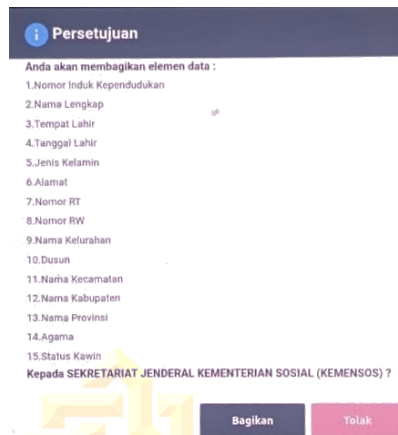
Login dilakukan setiap kali pelayanan akan dilaksanakan agar sistem mencatat aktivitas sesuai dengan akun yang sedang aktif.

2) Proses Verifikasi Identitas Penerima

Setelah proses login IKD berhasil, sistem menampilkan halaman persetujuan berbagi data identitas. Pada halaman tersebut terlihat rincian elemen data yang akan dibagikan kepada Kementerian Sosial, seperti Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, serta informasi administratif lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

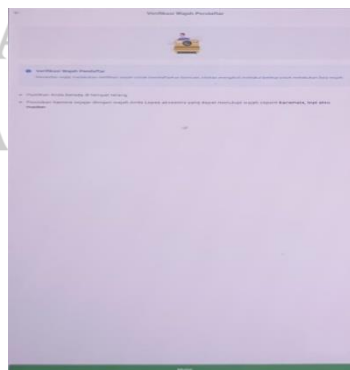
¹⁰⁴ Manshur, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 19 November 2025.



Gambar 4.10
Tampilan Persetujuan Berbagi Data
Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Pengguna diminta memilih opsi “Bagikan” untuk memberikan persetujuan atas penggunaan data tersebut. Tanpa persetujuan ini, sistem tidak melanjutkan ke tahap berikutnya.

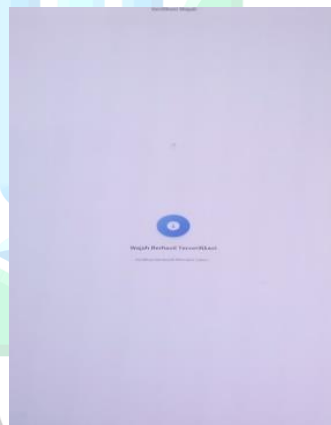
Setelah persetujuan diberikan, sistem mengarahkan pengguna ke tahap verifikasi wajah. Pada halaman verifikasi terlihat instruksi agar wajah menghadap kamera dengan pencahayaan yang cukup dan tanpa penutup wajah.



Gambar 4.11
Tampilan Proses Verifikasi Wajah
Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Petugas mengarahkan penerima manfaat untuk mengikuti instruksi yang muncul pada layar. Sistem kemudian memproses pencocokan wajah dan menampilkan hasil verifikasi. Apabila proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa wajah telah berhasil diverifikasi.

Petugas mengarahkan penerima manfaat untuk mengikuti instruksi yang muncul pada layar. Sistem kemudian memproses pencocokan wajah dan menampilkan hasil verifikasi. Apabila proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa wajah telah berhasil diverifikasi.



Gambar 4.12

Status Wajah Berhasil Terverifikasi

Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Sebagaimana disampaikan Pendamping E - bansos:

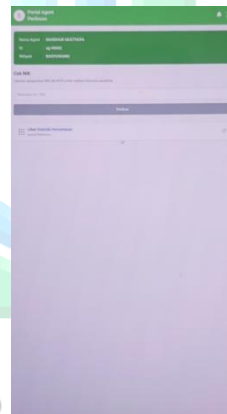
Setelah data dibagikan dari IKD, biasanya dilakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang diakses sesuai dengan identitas penerima. Kalau verifikasi wajahnya berhasil, sistem akan lanjut ke tahap berikutnya. Setelah itu baru

muncul tampilan data penerima di layar. Dari situ petugas bisa melihat data yang diperlukan.¹⁰⁵

Tahap verifikasi ini dilakukan sebelum data penerima ditampilkan secara lengkap dalam sistem.

3) Proses Pelayanan dan Konfirmasi Data

Setelah proses verifikasi identitas melalui IKD dan verifikasi wajah berhasil dilakukan, sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman Portal Agen. Pada halaman tersebut terlihat identitas agen yang sedang aktif beserta wilayah kerjanya.



Gambar 4.13

Tampilan Informasi Pendaftar

Sumber: Aplikasi PERLINSOS

Pada halaman ini tersedia fitur “Cek NIK” yang digunakan untuk melakukan pengecekan data penerima manfaat. Petugas memasukkan nomor induk kependudukan (NIK)

¹⁰⁵ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

penerima yang datang untuk memastikan bahwa data yang tersimpan dalam sistem sesuai dengan identitas penerima.

Proses ini dilakukan setiap kali ada penerima yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu petugas, dijelaskan bahwa setelah verifikasi IKD dan wajah selesai, petugas tidak langsung menyimpulkan pelayanan selesai, melainkan kembali ke portal agen untuk memastikan data yang bersangkutan benar-benar sesuai.

Pendamping bansos menjelaskan:

“Setelah proses IKD dan verifikasi wajah selesai, kami masuk lagi ke portal agen untuk cek NIK penerima. Dari situ kelihatan datanya lengkap atau tidak. Jadi tidak langsung selesai, tetap dicek lagi supaya sesuai.”¹⁰⁶

Petugas bansos juga menambahkan bahwa pengecekan NIK ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam pelayanan, terutama apabila terdapat kesamaan nama atau data yang mirip.

Melalui tahapan ini, petugas memastikan bahwa data yang akan diproses benar-benar sesuai dengan penerima yang hadir di lokasi pelayanan.

4) *Output* dan Status Layanan

Setelah NIK dimasukkan dan data ditemukan dalam sistem, PERLINSOS menampilkan halaman informasi penerima

¹⁰⁶ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

secara lengkap. Pada halaman tersebut terlihat data identitas penerima seperti NIK, nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, daftar anggota keluarga, serta alamat tempat tinggal.

P

e

t

u

g

a



Gambar 4.14

Tampilan Informasi Penerima dan Program Bantuan

Sumber: Aplikasi PERLINSOS

s kemudian melakukan pengecekan melalui fitur “Cek NIK” untuk memastikan apakah penerima yang datang benar-benar terdaftar sebagai penerima manfaat dalam sistem. Data yang muncul pada layar menunjukkan status kepesertaan serta program bantuan yang aktif apabila yang bersangkutan memang terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara, petugas bansos menjelaskan bahwa proses pengecekan NIK menjadi tahap penting untuk memastikan status penerima sebelum pelayanan dilanjutkan. Ia menyampaikan bahwa:

Kalau sudah dimasukkan NIK-nya, nanti kelihatan apakah orang tersebut terdaftar sebagai penerima manfaat atau tidak. Kalau terdaftar, sistem langsung menampilkan program bantuannya. Kalau tidak terdaftar,

datanya tidak muncul atau ada keterangan tertentu di sistem.”¹⁰⁷

Petugas juga menjelaskan bahwa melalui tampilan tersebut dapat diketahui secara langsung status kepesertaan penerima, sehingga pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan informasi yang ditampilkan dalam sistem.

Selain kendala teknis yang berkaitan dengan jaringan dan akses sistem secara bersamaan, pelaksanaan Sistem E-Bansos melalui SIKS-NG dan PERLINSOS juga menghadapi kendala yang berkaitan dengan kesesuaian data antara kondisi di lapangan dan data yang tercatat dalam sistem.

Berdasarkan hasil observasi, dalam beberapa situasi terdapat perbedaan antara data yang dimiliki penerima manfaat dengan data yang tersimpan dalam sistem. Perbedaan tersebut dapat berupa perubahan alamat, perubahan status keluarga, atau pembaruan administrasi kependudukan yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem.

Petugas menyampaikan bahwa kondisi tersebut memerlukan pengecekan ulang sebelum proses dapat dilanjutkan. Apabila data yang tampil dalam sistem tidak sesuai dengan kondisi terkini penerima, maka pelayanan tidak dapat langsung diselesaikan dan perlu dilakukan penyesuaian melalui prosedur yang tersedia.

¹⁰⁷ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

Pendamping bansos menjelaskan:

Kadang ada penerima yang datanya di lapangan sudah berubah, misalnya pindah alamat atau ada perubahan keluarga, tapi di sistem masih data lama. Jadi harus dicek lagi dan disesuaikan.¹⁰⁸

Selain itu, terdapat pula kondisi di mana NIK yang dimasukkan tidak langsung menampilkan data penerima manfaat. Hal ini menyebabkan petugas perlu memastikan kembali apakah yang bersangkutan memang terdaftar sebagai penerima atau belum terdaftar dalam sistem.

Pendamping mengatakan “Pernah juga setelah NIK dimasukkan, datanya tidak muncul. Jadi harus dipastikan dulu apakah memang belum terdaftar atau ada kesalahan input.”¹⁰⁹

Kondisi perbedaan data tersebut menjadi bagian dari proses administrasi yang harus ditangani dalam pelaksanaan sistem elektronik, terutama ketika terjadi perubahan data di tingkat masyarakat yang belum sepenuhnya terbaru dalam sistem.

5) Alur Bagan *Flowchart* Sistem PERLINSOS

Bagan alur proses pada aplikasi PERLINSOS juga disusun berdasarkan hasil observasi serta diskusi dengan pendamping bantuan sosial yang terlibat langsung dalam pelayanan kepada penerima manfaat.

¹⁰⁸ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

¹⁰⁹ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

Sumber: Dibuat oleh Peneliti bersama Pendamping Bantuan Sosial, 2025

c. Proses Pelayanan kepada Penerima Manfaat melalui PERLINSOS

Pelayanan diawali dengan pemeriksaan kartu identitas oleh petugas. Penerima manfaat diminta menunjukkan kartu tanda

penduduk (KTP) sebagai dasar untuk melakukan pencarian data dalam sistem. Setelah itu, petugas memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) ke dalam aplikasi untuk memastikan apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima manfaat.

Salah satu informan menjelaskan bahwa tahapan tersebut dilakukan sebelum proses dilanjutkan ke verifikasi berikutnya. "Waktu datang, saya diminta menunjukkan KTP, lalu petugas memasukkan data saya ke komputer. Setelah itu baru difoto untuk verifikasi wajah."¹¹⁰ Setelah data ditemukan dalam sistem, proses dilanjutkan dengan verifikasi identitas melalui kamera perangkat yang digunakan petugas. Penerima manfaat mengikuti arahan yang diberikan, seperti menghadap kamera dan menunggu hingga sistem menyelesaikan pencocokan wajah.

Informan lainnya menyampaikan bahwa melalui pengecekan NIK tersebut dapat diketahui apakah yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial.

Setelah NIK dimasukkan ke dalam sistem, langsung kelihatan apakah saya terdaftar atau tidak. Prosesnya biasanya tidak lama karena datanya sudah tersimpan. Kalau memang terdaftar, informasi penerima akan muncul di layar. Dari situ bisa dilihat program bantuan apa saja yang diterima, Jadi petugas tinggal menyesuaikan dengan data yang tampil.¹¹¹

¹¹⁰ Husnul, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 5 Desember 2025

¹¹¹ Via, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 6 November 2025

Ia juga menjelaskan bahwa apabila data tidak langsung muncul, petugas biasanya melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam proses pencarian.

Sementara itu, informan ketiga menyampaikan bahwa seluruh tahapan dilakukan mengikuti arahan petugas hingga sistem menampilkan hasil verifikasi dan status pelayanan. "Saya mengikuti saja arahan petugas, diminta lihat kamera, lalu menunggu sampai selesai dan dinyatakan berhasil."¹¹²

Berdasarkan keterangan para penerima manfaat tersebut, proses verifikasi dan pelayanan melalui PERLINSOS melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengecekan identitas, pencarian data menggunakan NIK, verifikasi wajah, serta penampilan status dalam sistem sebelum pelayanan dinyatakan selesai. Seluruh tahapan dilakukan melalui perangkat yang digunakan oleh petugas dan hasilnya dapat dilihat secara langsung pada layar sistem.

d. Kendala dalam Implementasi Sistem E-Bansos

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama penelitian, pelaksanaan Sistem E-Bansos melalui SIKS-NG dan PERLINSOS di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi menghadapi beberapa kendala dalam proses operasionalnya.

Salah satu kendala yang sering terjadi berkaitan dengan stabilitas jaringan internet. Karena kedua sistem berbasis daring,

¹¹² Miswati, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 7 November 2025

seluruh proses mulai dari login, pemuatan data, hingga verifikasi identitas sangat bergantung pada koneksi internet yang stabil. Ketika jaringan mengalami gangguan, sistem memerlukan waktu lebih lama untuk memuat halaman atau menampilkan data penerima manfaat.¹¹³

Selain kendala jaringan, sistem juga mengalami perlambatan ketika digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna. Kondisi ini biasanya terjadi pada saat proses pendaftaran masyarakat atau pengecekan data dilakukan dalam jumlah banyak pada waktu yang sama.

Pendamping bansos menyampaikan bahwa:

Kalau banyak yang akses bersamaan, sistem biasanya jadi lebih lambat. Apalagi kalau lagi jam pelayanan ramai. Kadang halaman lama terbuka atau harus nunggu beberapa saat. Bahkan ada kondisi tertentu sistem tidak bisa dibuka sementara waktu. Biasanya petugas menunggu sampai aksesnya normal kembali.¹¹⁴

Pendamping juga menjelaskan bahwa dalam beberapa kondisi aplikasi dapat mengalami hang atau tidak merespons ketika sedang memproses data.

Pernah juga aplikasinya seperti berhenti saat dipakai bersamaan. Biasanya layarnya tidak bisa bergerak atau perintahnya tidak langsung jalan. Kondisi seperti itu sering terjadi kalau banyak yang akses dalam waktu bersamaan. Kalau sudah begitu, biasanya harus ditunggu beberapa saat. Kadang juga perlu login ulang supaya bisa dipakai lagi.¹¹⁵

¹¹³ Observasi di DINSOSPPKB Banyuwangi, 19 November 2025

¹¹⁴ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

¹¹⁵ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

Selain kendala teknis, terdapat pula kondisi di mana data di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Perubahan alamat atau pembaruan administrasi kependudukan yang belum terinput dapat menyebabkan data tidak langsung ditemukan ketika NIK dimasukkan.

Pendamping menyampaikan bahwa: "Kadang ada data yang belum ter-update di sistem, jadi harus dicek lagi sebelum dipastikan statusnya."¹¹⁶ Kendala-kendala tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan bantuan sosial.

2. Implementasi Sistem E-Bansos terhadap Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi Sistem E-Bansos melalui aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS tidak hanya digunakan dalam proses pengelolaan data penerima manfaat, tetapi juga berkaitan dengan penyajian informasi yang dapat dilihat secara langsung melalui sistem yang digunakan oleh petugas. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, berbagai informasi yang berkaitan dengan penerima bantuan sosial dapat ditampilkan secara sistematis melalui fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi tersebut.¹¹⁷

Melalui sistem tersebut, petugas dapat melihat data penerima manfaat, status program bantuan sosial, serta informasi administratif

¹¹⁶ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 19 November 2025

¹¹⁷ Observasi di DINSOSPPKB Banyuwangi, 19 November 2025

lainnya yang berkaitan dengan penerima bantuan. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk tabel data maupun tampilan status penerima yang muncul pada layar sistem ketika dilakukan proses pencarian atau verifikasi identitas.

Selain itu, sistem juga menyediakan fitur penyaringan data berdasarkan wilayah administratif maupun jenis program bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Dengan adanya fitur tersebut, petugas dapat menelusuri data penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengelolaan bantuan sosial pada wilayah tertentu.

Penyajian informasi melalui sistem digital tersebut memperlihatkan bagaimana data penerima bantuan sosial dapat ditampilkan secara langsung melalui sistem yang digunakan dalam pengelolaan program bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi.

a. Penyajian Informasi Penerima Manfaat melalui Sistem E – Bansos

Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi SIKS-NG, informasi mengenai penerima manfaat bantuan sosial dapat dilihat melalui menu *View DTSN* yang terdapat pada *dashboard* sistem. Menu tersebut menampilkan data penerima manfaat dalam bentuk tabel yang memuat informasi identitas penerima bantuan sosial.¹¹⁸

¹¹⁸ Observasi di DINSOSPPKB Banyuwangi, 19 November 2025

Informasi yang ditampilkan dalam tabel tersebut meliputi nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, alamat tempat tinggal, serta kategori kesejahteraan yang tercatat dalam sistem. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur penyaringan data yang memungkinkan petugas untuk menampilkan data penerima bantuan berdasarkan wilayah tertentu seperti kecamatan dan desa.

Melalui fitur tersebut, petugas dapat menelusuri data penerima bantuan sosial yang tercatat dalam sistem sesuai dengan wilayah administrasi yang dipilih. Informasi yang muncul dalam sistem menjadi acuan bagi petugas dalam melihat data penerima manfaat yang telah terdaftar dalam sistem pengelolaan bantuan sosial.

Pendamping bansos menjelaskan bahwa:

“Kalau mau melihat data penerima bantuan atau program yang sedang berjalan, biasanya kami membuka menu View DTSN. Di dalam menu itu data penerima bisa ditampilkan sesuai kebutuhan. Misalnya ingin melihat berdasarkan kecamatan atau desa tertentu, tinggal difilter saja di sistem. Dari situ juga bisa diketahui jenis bantuan apa saja yang diterima oleh masing-masing penerima manfaat.”¹¹⁹

Tampilan data penerima manfaat tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai penerima bantuan sosial dapat ditampilkan melalui sistem yang digunakan oleh petugas dalam proses pengelolaan data bantuan sosial.

b. Informasi Status Penerima Bantuan melalui Sistem Perlinsos

¹¹⁹ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 28 November 2025

Selain melalui aplikasi SIKS-NG, penyajian informasi penerima bantuan sosial juga terlihat pada penggunaan aplikasi PERLINSOS yang digunakan dalam proses pelayanan kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama penelitian, setelah proses login melalui IKD dan verifikasi identitas selesai dilakukan, sistem menampilkan informasi mengenai status penerima manfaat berdasarkan nomor induk kependudukan yang dimasukkan oleh petugas.

Pada tampilan tersebut terlihat data identitas penerima bantuan sosial beserta informasi mengenai program bantuan sosial yang diterima apabila yang bersangkutan terdaftar dalam sistem. Informasi yang muncul dalam sistem dapat dilihat secara langsung oleh petugas sebelum proses pelayanan dilanjutkan kepada penerima manfaat.

Pendamping bansos menjelaskan bahwa:

“Setelah nomor NIK dimasukkan ke dalam sistem, biasanya langsung terlihat apakah orang tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak. Kalau memang terdaftar, sistem akan menampilkan data identitasnya sekaligus program bantuan yang sedang diterima. Jadi petugas bisa melihat informasi itu langsung di layar sebelum melanjutkan pelayanan kepada penerima manfaat.”¹²⁰

Melalui tampilan tersebut petugas dapat melihat status penerima manfaat yang tercatat dalam sistem sebelum memberikan

¹²⁰ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 28 November 2025

pelayanan lebih lanjut kepada masyarakat yang datang untuk mengakses bantuan sosial.

3. Implementasi Sistem E-Bansos terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi Sistem E-Bansos melalui aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS berkaitan dengan proses pencatatan data penerima bantuan sosial serta verifikasi identitas penerima manfaat dalam sistem yang digunakan oleh petugas. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, penggunaan sistem tersebut melibatkan beberapa tahapan yang berkaitan dengan pengendalian akses pengguna, verifikasi identitas penerima, serta pencatatan data penerima bantuan sosial yang tersimpan dalam sistem.

Penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan bantuan sosial memungkinkan setiap aktivitas yang dilakukan oleh petugas tercatat melalui akun pengguna yang sedang aktif. Melalui mekanisme

tersebut, proses pengelolaan data penerima manfaat dapat ditelusuri kembali berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dalam sistem.

Selain itu, dalam proses pelayanan kepada penerima manfaat juga dilakukan verifikasi identitas menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta verifikasi wajah yang dilakukan melalui aplikasi PERLINSOS. Proses verifikasi tersebut dilakukan sebelum data penerima manfaat ditampilkan dalam sistem.

a. Pengendalian Akses Sistem melalui Akun Pengguna

Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi SIKS-NG, setiap pengguna yang mengakses sistem diwajibkan melakukan login menggunakan akun yang telah terdaftar dalam sistem. Akun tersebut digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangan pengguna dalam pengelolaan data bantuan sosial.¹²¹

Proses login dilakukan dengan memasukkan *username* dan *password* pada halaman login sistem. Setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, dashboard aplikasi menampilkan identitas akun pengguna yang sedang aktif serta menu-menu yang dapat digunakan untuk mengakses fitur pengelolaan data bantuan sosial.

Pendamping bansos menjelaskan bahwa:

Setiap operator atau pendamping memiliki akun sendiri untuk masuk ke sistem SIKS-NG. Akun itu tidak dipakai bersama karena sudah ditentukan sesuai dengan wilayah dan tugas masing-masing pengguna. Ketika kami login, sistem akan mencatat aktivitas yang dilakukan melalui akun tersebut, sehingga proses pengelolaan data bisa diketahui siapa yang mengerjakannya.¹²²

Melalui penggunaan akun pengguna tersebut, setiap aktivitas yang dilakukan dalam sistem dapat dihubungkan dengan pengguna yang sedang mengakses sistem pada saat itu.

b. Verifikasi Identitas Penerima melalui IKD dan Verifikasi Wajah

¹²¹ Observasi di DINSOSPPKB Banyuwangi, 28 November 2025

¹²² Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 28 November 2025

Selain pengendalian akses melalui akun pengguna, implementasi sistem elektronik bansos juga melibatkan proses verifikasi identitas penerima bantuan sosial melalui aplikasi PERLINSOS. Berdasarkan hasil observasi selama penelitian, proses pelayanan kepada penerima manfaat diawali dengan login melalui akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digunakan oleh petugas.

Setelah proses *login* berhasil dilakukan, sistem menampilkan halaman persetujuan berbagi data identitas yang dilanjutkan dengan proses verifikasi wajah menggunakan kamera perangkat yang digunakan oleh petugas. Pada tahap ini penerima manfaat diminta mengikuti instruksi yang muncul pada layar untuk memastikan wajah dapat dikenali oleh sistem.

Pendamping bansos menjelaskan bahwa:

Biasanya sebelum pelayanan dimulai kami login dulu melalui akun IKD yang terhubung dengan portal agen PERLINSOS. Setelah itu penerima diminta melakukan verifikasi wajah di depan kamera. Sistem akan mencocokkan wajah dengan data kependudukan yang tersimpan. Jika proses verifikasi berhasil, barulah data penerima dapat ditampilkan di sistem.¹²³

Melalui proses verifikasi tersebut, sistem menampilkan informasi penerima bantuan sosial yang telah terdaftar dalam sistem sebelum pelayanan dilanjutkan oleh petugas.

c. Pencatatan Perubahan Data Penerima dalam Sistem E – Bansos

¹²³ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 28 November 2025

Selain proses verifikasi identitas penerima manfaat, sistem elektronik bansos juga digunakan dalam pencatatan perubahan data penerima bantuan sosial. Berdasarkan hasil observasi pada aplikasi SIKS-NG, perubahan data penerima dapat dilakukan melalui menu Mutasi Penerima Manfaat yang tersedia dalam dashboard sistem.

Menu tersebut digunakan ketika terdapat perubahan kondisi administratif penerima bantuan sosial, seperti perpindahan wilayah tempat tinggal atau perubahan status penerima manfaat. Melalui fitur tersebut, petugas dapat melakukan pembaruan data sehingga informasi yang tersimpan dalam sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi terbaru penerima bantuan sosial.

Pendamping bansos menjelaskan bahwa:

Kalau ada perubahan data penerima biasanya dilakukan melalui menu mutasi di SIKS-NG. Misalnya ketika penerima pindah alamat atau ada perubahan kondisi keluarga. Data yang lama tetap tersimpan di sistem, kemudian diperbarui melalui proses mutasi sehingga data yang digunakan bisa menyesuaikan dengan kondisi terbaru di lapangan.¹²⁴

Perubahan data yang dilakukan melalui sistem tersebut tersimpan dalam database aplikasi dan dapat ditampilkan kembali melalui fitur pencarian data yang tersedia pada sistem.

d. Laporan Realisasi Anggaran Bantuan Sosial

Selain implementasi sistem elektronik dalam pengelolaan data penerima manfaat, penelitian ini juga mengkaji data realisasi

¹²⁴ Manshur, diwawancara oleh Peneliti, Banyuwangi, 28 November 2025

anggaran bantuan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi. Data ini digunakan untuk melihat besaran alokasi dan realisasi belanja bantuan sosial dalam periode anggaran yang diteliti.

Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA), belanja bantuan sosial tercatat dalam kode rekening 5106. Pada periode anggaran yang diteliti, pagu anggaran belanja bantuan sosial sebesar Rp16.040.325.000,00. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp11.800.175.000,00, atau sebesar 73,57 persen dari total anggaran yang tersedia. Sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp4.240.150.000,00.¹²⁵

51	BELANJA OPERASI	2.684.308.893.945,71	1.566.170.625.460,84	58,35	1.118.138.268.484,87
5101	Belanja Pegawai	1.308.312.097.963,60	922.649.164.989,08	70,52	385.662.932.974,52
5102	Belanja Barang dan Jasa	1.192.879.326.714,11	598.809.028.159,76	50,20	594.070.298.554,35
5103	Belanja Bunga	7.795.188.268,00	5.661.571.312,00	72,63	2.133.616.956,00
5105	Belanja Hibah	159.281.956.000,00	27.250.686.000,00	17,11	132.031.270.000,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	16.040.325.000,00	11.800.175.000,00	73,57	4.240.150.000,00

Gambar 4.16

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Dalam laporan tersebut, belanja bantuan sosial merupakan bagian dari kelompok Belanja Operasi. Data realisasi anggaran disajikan dalam bentuk nominal anggaran, realisasi, persentase capaian, serta sisa anggaran. Informasi tersebut menunjukkan

¹²⁵ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, "Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2025," *Pemkab Banyuwangi* (Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, n.d.), https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/foehoqtdzu_20-november.pdf.

rincian pelaksanaan belanja bantuan sosial sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi pemerintah daerah.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Sistem E-Bansos dalam dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, dan melaporkan data guna menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa SIA tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana pengendalian dan penyedia informasi bagi pengambilan keputusan organisasi.¹²⁶

Dalam konteks penelitian ini, implementasi Sistem E-Bansos melalui SIKS-NG dan PERLINSOS memperlihatkan struktur sistem yang memenuhi komponen dasar SIA, yaitu input, proses, penyimpanan data, output, serta pengendalian internal.

a. Komponen *Input*

Pada aplikasi SIKS-NG, *input* dilakukan melalui pembaruan data penerima manfaat, *mapping* pendamping, serta mutasi data. Setiap perubahan data tercatat dalam sistem sesuai dengan akun pengguna yang *login*. Sementara pada aplikasi PERLINSOS, input dilakukan melalui pengecekan NIK serta autentikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

¹²⁶ Marshall B Romney, *Sistem Informasi Akuntansi, 13th Ed.*

Proses autentikasi IKD dan verifikasi wajah menunjukkan bahwa input data tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melalui mekanisme konfirmasi identitas secara digital. Hal ini memperkecil kemungkinan kesalahan identifikasi penerima manfaat.

b. Komponen Proses

Proses dalam sistem terlihat melalui tahapan verifikasi, pencocokan data, serta validasi identitas. *Flowchart* yang disusun bersama pendamping bantuan sosial menunjukkan bahwa tahapan tersebut berjalan secara berurutan dan terdokumentasi.

Menurut Hall, Sistem Informasi Akuntansi yang baik harus memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk memastikan setiap transaksi diproses secara konsisten.¹²⁷ Dalam penelitian ini, tahapan login, pemilihan menu, verifikasi wajah, serta konfirmasi status menunjukkan adanya prosedur operasional yang terstruktur dalam sistem.

c. Komponen *Output*

Output sistem dapat dilihat pada tampilan status penerima manfaat, informasi program bantuan yang aktif, serta laporan realisasi anggaran bantuan sosial. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, belanja bantuan sosial memiliki pagu sebesar

¹²⁷ James A Hall, *Accounting Information Systems*, 9th ed. (Boston: Cengage Learning, 2016).

Rp16.040.325.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.800.175.000,00 atau 73,57%.¹²⁸

Informasi tersebut merupakan bagian dari output sistem yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta evaluasi pelaksanaan anggaran. Menurut Bodnar dan Hopwood, kualitas output dalam sistem informasi akuntansi harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dan dapat dipahami.¹²⁹ Dalam konteks ini, sistem elektronik menampilkan data penerima dan status bantuan secara langsung, sehingga informasi dapat diketahui secara cepat oleh petugas.

d. Pengendalian Internal

Penggunaan akun login pada SIKS-NG serta autentikasi IKD pada PERLINSOS menunjukkan adanya pengendalian akses (access control). Setiap aktivitas dalam sistem tercatat berdasarkan identitas pengguna, sehingga memungkinkan keterlacakan aktivitas.

Konsep pengendalian internal dalam SIA bertujuan untuk melindungi aset, menjaga keakuratan data, serta memastikan kepatuhan terhadap prosedur.¹³⁰ Dalam penelitian ini, verifikasi wajah dan autentikasi digital merupakan bagian dari mekanisme

¹²⁸ Banyuwangi, "Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2025."

¹²⁹ George H Bodnar and William S Hopwood, *Accounting Information Systems*, 11th ed. (Boston: Pearson, 2013).

¹³⁰ Marshall B Romney, *Sistem Informasi Akuntansi*, 13th Ed.

pengendalian untuk memastikan bahwa bantuan sosial diterima oleh pihak yang sesuai.

Dengan demikian, implementasi Sistem E-Bansos melalui SIKS-NG dan PERLINSOS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki struktur input, proses, output, serta pengendalian internal sebagaimana konsep Sistem Informasi Akuntansi.

2. Implikasi terhadap Transparansi

a. Keterbukaan Informasi Penerima Manfaat

Implementasi sistem elektronik dalam penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi SIKS-NG dan PERLINSOS memperlihatkan adanya mekanisme penyajian informasi penerima manfaat yang tersimpan dalam basis data digital. Melalui sistem tersebut, petugas dapat melakukan pengecekan data penerima bantuan sosial dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada aplikasi yang digunakan dalam pelayanan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping bantuan sosial, ketika data NIK dimasukkan ke dalam sistem, aplikasi akan menampilkan informasi mengenai status penerima bantuan serta

program bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat dilihat langsung oleh petugas melalui tampilan sistem yang tersedia dalam aplikasi pelayanan bantuan sosial.¹³¹

Ketersediaan informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem elektronik memungkinkan proses identifikasi penerima manfaat dilakukan secara lebih sistematis dibandingkan dengan mekanisme manual. Petugas dapat mengetahui status penerima bantuan sosial secara langsung berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem, sehingga proses pelayanan bantuan sosial dapat dilakukan dengan mengacu pada data yang telah terdokumentasi secara digital.

Dalam perspektif tata kelola sektor publik, transparansi merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Mardiasmo menjelaskan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan.¹³² Oleh karena itu, ketersediaan informasi penerima manfaat dalam sistem elektronik dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme penyediaan informasi yang mendukung transparansi pelayanan bantuan sosial.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Pendamping Bantuan Sosial Kabupaten Banyuwangi, 28 November 2025.

¹³² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik, 18th Ed.*

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.¹³³ Implementasi sistem elektronik dalam pengelolaan bantuan sosial memperlihatkan adanya mekanisme pencatatan dan penyajian informasi yang terdokumentasi secara digital.

Dalam perspektif syariah, pengelolaan dana publik seperti bantuan sosial berkaitan erat dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam menyampaikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap pengelolaan dana yang berasal dari masyarakat harus dilaksanakan secara jujur, adil, serta disertai dengan keterbukaan informasi dalam proses pelaksanaannya. Rifai menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur administratif, tetapi juga oleh kesadaran etika dan spiritual dari pihak yang mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, keberadaan sistem elektronik dalam penyaluran bantuan sosial dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan yang memungkinkan proses pencatatan, verifikasi, serta

¹³³ Indoneisa, Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

pengawasan bantuan sosial dilakukan secara lebih terdokumentasi dan terbuka.¹³⁴

3. Implikasi terhadap Akuntabilitas

a. Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Sosial dalam Prespektif Akuntanssi Sektor Publik

Akuntabilitas dalam sektor publik merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang harus dilaksanakan secara transparan dan dapat diaudit.¹³⁵

Melalui sistem tersebut, proses pelayanan bantuan sosial tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga didukung oleh dokumentasi data yang tersimpan dalam sistem elektronik.

Informasi mengenai penerima manfaat, status bantuan, serta proses

verifikasi identitas dapat ditampilkan melalui sistem yang digunakan oleh petugas pelayanan bantuan sosial. Pencatatan data dalam sistem elektronik memungkinkan informasi mengenai penerima bantuan sosial dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses pelayanan maupun pengawasan program bantuan sosial.

¹³⁴ Rifai, "How to Reduce Moral Hazard Crisis in Business: Study from Indonesian's Pesantren."

¹³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 18th Ed.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, penyusunan laporan pelaksanaan program bantuan sosial juga merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Indra Bastian menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam lembaga pemerintah untuk mengelola serta melaporkan penggunaan dana publik.¹³⁶ Melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran, instansi pemerintah dapat menunjukkan bagaimana anggaran bantuan sosial digunakan dalam pelaksanaan program pelayanan kepada masyarakat.

b. Akuntabilitas Penyaluran Bansos

Penyaluran bantuan sosial merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi maupun sosial. Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, proses penentuan penerima manfaat serta mekanisme penyaluran bantuan menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

¹³⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2010).

Melalui implementasi sistem E-Bansos, proses penyaluran bantuan sosial didukung oleh sistem pencatatan digital yang memungkinkan data penerima bantuan tersimpan dalam basis data yang terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan petugas pelayanan bantuan sosial melakukan pengecekan data penerima manfaat berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga proses verifikasi penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.¹³⁷

Penggunaan sistem elektronik dalam penyaluran bantuan sosial juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas mencakup tiga unsur utama, yaitu penyediaan informasi, penjelasan atas tindakan, serta adanya kemungkinan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.¹³⁸ Dalam konteks ini, sistem seperti SIKS-NG dan PERLINSOS memungkinkan data penerima

manfaat, proses pelayanan, serta status bantuan tersimpan dalam sistem digital sehingga dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses pelayanan maupun pengawasan.

c. Ketepatan Sasaran dalam Penyaluran Bantuan Sosial

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Pendamping Bantuan Sosial Kabupaten Banyuwangi, 28 November 2025.

¹³⁸ Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–68, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>.

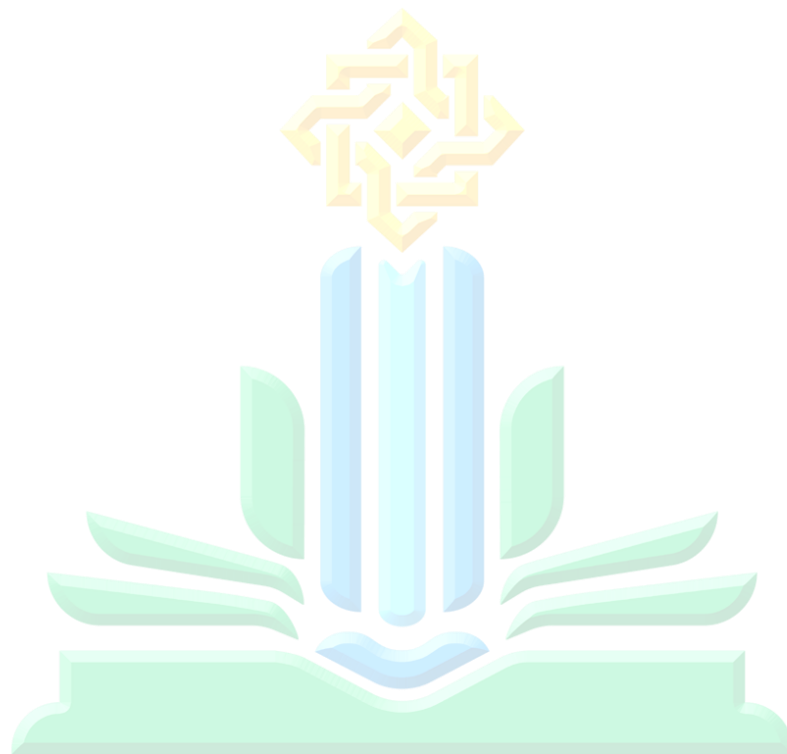
Dalam pelaksanaan program bantuan sosial berbasis sistem elektronik, aplikasi PERLINSOS terintegrasi dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga data penerima manfaat dapat diakses melalui basis data kependudukan yang tersimpan dalam sistem. Integrasi tersebut memungkinkan petugas pelayanan bantuan sosial melihat informasi identitas penerima secara langsung berdasarkan data kependudukan yang telah tercatat secara digital. Melalui sistem ini, data penerima bantuan tidak hanya berasal dari pencatatan administratif, tetapi juga terhubung dengan data kependudukan yang telah terintegrasi dalam sistem pelayanan pemerintah.¹³⁹

Selain itu, sistem yang terintegrasi tersebut memungkinkan proses penyaringan data penerima bantuan dilakukan secara lebih terstruktur. Informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tersimpan dalam basis data kesejahteraan sosial dapat

digunakan sebagai dasar dalam menentukan penerima manfaat sesuai dengan kriteria program bantuan sosial. Dengan adanya mekanisme tersebut, sistem PERLINSOS dapat membantu proses penyaluran bantuan sosial agar lebih terarah kepada masyarakat

¹³⁹ Sekretariat Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013” (2013).

yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat yang telah ditetapkan dalam program bantuan sosial.¹⁴⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴⁰ Sekretariat Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial” (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem E-Bansos dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi Sistem E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dilakukan melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan PERLINSOS yang digunakan dalam proses pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Melalui sistem tersebut, data penerima bantuan sosial dikelola secara digital sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pencatatan, pemutakhiran data, serta pemantauan program bantuan sosial yang sedang berjalan.

Pemanfaatan sistem elektronik juga membantu proses administrasi pelayanan karena sebagian besar kegiatan pengelolaan data dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan basis data kesejahteraan sosial pemerintah.

2. Implikasi Sistem E-Bansos terhadap Transparansi Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi sistem E-Bansos memberikan implikasi terhadap transparansi penyaluran bantuan sosial karena informasi mengenai

status penerima manfaat, program bantuan sosial, serta data pelayanan tersimpan dalam sistem digital yang dapat diakses oleh petugas. Melalui sistem tersebut, petugas dapat melihat riwayat program bantuan yang diterima oleh masyarakat serta status bantuan yang sedang berjalan sehingga mempermudah proses pemantauan dan pelayanan. Pencatatan data dalam sistem digital juga memungkinkan informasi bantuan sosial dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi Sistem.

3. E - Bansos terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Implementasi sistem elektronik bansos juga memberikan implikasi terhadap akuntabilitas penyaluran bantuan sosial karena setiap proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas tercatat dalam sistem digital. Penggunaan akun pengguna dalam sistem memungkinkan aktivitas pelayanan dapat diketahui berdasarkan identitas petugas yang melakukan akses sehingga setiap tahapan pengelolaan bantuan sosial memiliki jejak data yang tersimpan dalam sistem. Dengan adanya pencatatan digital tersebut, proses pengelolaan bantuan sosial dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses administrasi maupun evaluasi program.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian mengenai implementasi Sistem E-Bansos di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas dan stabilitas jaringan internet serta optimalisasi kapasitas sistem, mengingat temuan penelitian menunjukkan adanya hambatan teknis ketika aplikasi digunakan secara bersamaan dalam proses pendaftaran maupun verifikasi data penerima manfaat.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis berkala, karena efektivitas implementasi sistem sangat bergantung pada kemampuan operator dalam melakukan verifikasi dan pengelolaan data secara akurat.
3. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap sinkronisasi data penerima manfaat guna meminimalkan ketidaksesuaian data serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Sasmita, Yahfie. “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Peningkatan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Tahun Ajaran 2021.” Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, 2021.
- Akbar, Rusdi. “Pengukuran Kinerja Dan Akuntabilitas Publik Di Indonesia Studi Awal Di Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik* 1, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>.
- Al-Hajjaj, Muslim Ibn. *Sahih Muslim. Kitab Al-Imarah: Bab Tahrim Al-Ghishsh Li Al-Ra'yyah*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, n.d.
- Amalia, Mildatul Anzu, and Adil Siswanto. “Analysis of the Perceptions of Students of the Faculty of Economics and Islamic Business towards the Accountability of the Jember Amil Zakat Institution in the Digital Era.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 2 (2025): 688–93. <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i2.2692>.
- Amerieska, Siti, Gugus Irianto, and Diedied P Affandy. “Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory.” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 1 (2012): 27–39.
- Amri, Zulfikar Fikri. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan (Studi Kasus Di Kantor Kecamatan Semarang Timur) Tahun Ajaran 2022.” Skripsi, Universitas Semarang, 2022.
- Andriati, Rizky, and Nurul Huda. “The Influences of Productive Zakah Mentoring To Saving Behavior and The Prosperity of Poor Housewife.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2015): 207–16. <https://doi.org/10.15408/aiq.v7i2.1698>.
- Ardelia Zamrizal, Niken, Izzah Sholehah, and Azzah Nabila. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Laporan Keuangan Syariah: Tinjauan Sistematis.” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2025): 18–33. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>.
- Athallah, Ariq Hikmal. “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pada Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Palembang Tahun Ajaran 2024.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2024.
- Azwar. “Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam.” *Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i6.1592>.
- Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten. “Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2025.” *Pemkab Banyuwangi*. Banyuwangi: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, n.d.

https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/foehoqtdzu_20-november.pdf.

Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Bodnar, George H, and William S Hopwood. *Accounting Information Systems*. 11th ed. Boston: Pearson, 2013.

Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–68. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Dharmawati, Tuti, Wulandari Pryangan, Rizky Maharani Rustam, Burhanuddin, Gjosphink Putra Umar Sakka, and Dk Fitria. *Sistem Informasi Akuntansi*. Penerbit Adab, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=mGvLEAAQBAJ>.

Eka Wardani, Sulistiowati Aprilia. "Sistem Informasi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Pada Kelurahan Desa Gembong Berbasis Web Responsif Menggunakan Notifikasi Whatsapp Tahun Ajaran 2021." Skripsi, Universitas Mulia Kudus, 2021.

Endaryati, Eni. *Sistem Informasi Akuntansi*. Semarang: Yayasan Agus Teknik, 2021.

Fauzan, Faizatul Hikmah, Uswatun Hasanah, and Faizzatul Zuhroh. "Model Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Balai Kreatif." *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023): 1–14.

Feby Laksosno, Arsen Anggoro, and Nurgiyatna. "Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dan Bantuan Sosial" 1 (2023): 138–46.

Gurendrawati, Etty, Prof. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, Hera Khairunnisa, and Muhammad Zairin Gentiga. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by M. Pd Kodri. 1st ed. Bumi Aksara, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=ITUVEQAAQBAJ>.

Hall, James A. *Accounting Information Systems*. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2016.

Hasanah, Uswatun, Harisah, and Mohammad Ali Al Humaidy. "Innovation in Distribution of Wealth Through Zakat: Building Shared Prosperity by Applying Tafsir Qs. At-Taubah Verse 60." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 32, no. 3 (2021): 167–86.

Hasibuan, Renika, Meifida Ilyas, Lesi Hertati, Endra Saputra, Baiq Anggun Hilendri Lestari, Ketut Tanti Kustina, and Rida Ristiyana. *Sistem Akuntansi*. Edited by S.Pd Penyunting Ariyanto, M.Pd, Tri Putri Wahyuni. *Sistem*

Akuntansi. 1st ed. Vol. 19. PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hidayatul Khasan, Muhammad Khanif, Teta Riasih, Suradi, and Eko Gunawan Wibisono. "Persepsi Warga Masyarakat Terhadap Aplikasi Cek Bansos Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Desa Kalikidang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial*, 2025. <https://doi.org/https://doi.org/10.31595/10.31595/lindayasos.v7i1.1604>.

Indoneisa, Sekretariat Republik. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Republik Indonesia § (2008). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28425/UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28425/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202008.pdf).

———. Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Republik Indonesia § (2011). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28684/UU 20 Tahun 2011.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28684/UU%202011.pdf).

Indonesia, Departemen Agama Republik. "Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58." kementerian Agama, n.d. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=1>.

Indonesia, Sekretariat Republik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E - Goverment, Pub. L. No. 12, 1 (2003). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/139159/INPRES NO 3 TH 2003.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/139159/INPRES%20NO%203%20TH%202003.pdf).

———. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/30197/UU Nomor 15 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/30197/UU%20Nomor%2015%20Tahun%202004.pdf).

———. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (2003). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/31132/UU Nomor 17 Tahun 2003.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/31132/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202003.pdf).

Indrarini, Rachma, and Aditya Surya Nanda. "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syariah." *Akrual: Jurnal Akuntansi* 8, no. 2 (2017): 166–78. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj>.

Istiawan, Wan Rizki Debi. "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Pos Tanjungpinang 29100 Tahun Ajaran 2022." Skripsi, STIE Pembangunan, 2022.

Jauhari, Munawir. "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjung Pinang Tahun Ajaran 2023." Skripsi, STIE Tanjung Pinang, 2023.

Katiman. "The Role of Social Protection Program in Indonesian Economy: Its Origin and Development." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi*

Publik) 16, no. 1 (2012): 21–38.

Kota Medan, Pemerintah. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Medan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Download/251760/perwa_kota_medan_no.13_thn_2018_ok.pdf.

Lindrawati. “Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Data Prosesing.” *Jurnal Widya Manajemen & Akuntansi* 1 (2001): 27–34.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik, 18th Ed.* 18th ed. indonesia: Andi Offset, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ>.

Marsela, Selli. “Sistem Akuntansi Pencairan Dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Ajaran 2020.” Skripsi, UIN Suska Riau, 2020.

Marshall B Romney, Paul John. *Sistem Informasi Akuntansi, 13th Ed.* Edited by Muhammad Maskyur. 13th ed. Salemba 4, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/nq/s11-VII.174.333d>.

Marshall B Romney, Paul John steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat.* 13th ed., 2020. <https://doi.org/10.1093/nq/s11-VII.174.333d>.

Masruroh, Nikmatul, Abdul Muis, Firda Nur Isnaeni, and Kelvin Putra. “Urgensitas Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) Untuk Efektifitas Kerja Karyawan.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 4, no. 4 (2024): 845–52. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21047>.

Meliala, Akt, Drs. Tulis S., Niko Silitonga, SE., MM, and Dr. Timbul Sinaga, SE., MSA. “Akutansi Sektor Publik Edisi2.” *Penerbit Semesta Media*, 2007, 10.

Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Mukid, Hali, and Ahmad Homaidi. “Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Pengembangan Sistem Informasi Sekolah Berbasis Web.” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 12 (2024): 14–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1071>.

Nur Afifah, Shinta, Anton Subarno, and Nur Rahmi Akbarini. “Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Wonosobo.” *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)* 7 (2023): 212. <https://doi.org/10.20961/jikap.v7i2.62402>.

- Nurkandi. ARW. "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Analisis Akuntansi Syariah) Semester Genap Tahun Ajaran 2024." Skripsi, IAIN Perepare, 2024.
- Pemerintah Kota Palu. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial, Republik Indonesia § (2021). https://peraturan.bpk.go.id/Download/179309/No_20_TH_2021.pdf.
- Puji Ramadhani, Fidya, and Taufiqur Rahman. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Pensiun Syariah: Sebuah Tinjauan Sistematis Literatur." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2020): 180–94.
- Qoriaini, Hersa Farida, and M Taqwa Choiruzzady. "Peran Kementrian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1 (2025): 703–6. <https://doi.org/10.1515/9783110812220.bm>.
- Qoriani, Hersa Farida. "Strategy In Improving Study Customers: Baktimakmur Indah Surabaya Rural Bank (BPRS)." *International Journal of Management and Business Economics* 2, no. 1 (2024): 18–21. <https://doi.org/10.58540/ijmebe.v2i1.206>.
- Republik Indonesia, Sekertariat. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan (2008). https://peraturan.bpk.go.id/Download/28061/Perda_17_Thn_2008_SOTK_Dinas_Peternakan.pdf.
- . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 185, Republik Indonesia (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Download/112816/PP_Nomor_71_Tahun_2019.pdf.
- . Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Republik Indonesia § (2017). https://peraturan.bpk.go.id/Download/63512/Perpres_Nomor_63_Tahun_2017.pdf.
- . Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/332870/UU%20Nomor%201%20Tahun%202024.pdf>, Republik Indonesia 1 (2024).
- . Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pub. L. No. 13, 1 (2011). https://peraturan.bpk.go.id/Download/28650/UU_13_Tahun_2011.pdf.

- . Undang - Undang Republik Indonesia Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Republik Indonesia § (2008). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU Nomor 11 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/26683/UU%20Nomor%2011%20Tahun%202008.pdf).
- Retnaningsih, Hartini. “Bantuan Sosial Bagi Pekerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis Terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 2 (2020): 215–27. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1756>.
- Rifai, Khamdan. “How to Reduce Moral Hazard Crisis in Business: Study from Indonesian’s Pesantren.” *Journal of Islamic Economics Perspectives* 5, no. 1 (2023): 62–71. <https://doi.org/10.35719/jiep.v5i1.109>.
- Romney, Marshall B, and Paul John Steinbart. *Accounting Information Systems*. Pearson, 2018.
- Rumfek, Ditha Amelia. “Analisis Pengendalian Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Di Samsat Malang Kota.” *Sistem Informasi Akuntansi*, 2021, 167–86.
- Sahin, Ismail. “Detailed Review of Rogers’ Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology-Related Studies Based on Rogers’ Theory.” *The Turkish Online Journal of Educational Technology* 5, no. 2 (2006): 1303–6521.
- Salomi Jacomina Hehanussa. *Akuntansi Sektor Publik*. Edited by Yogi and Widi. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=THwIEQAAQBAJ>.
- Sari, Ratna, and Muslim Muslim. “Accountability and Transparency in Public Sector Accounting: A Systematic Review.” *Amkop Management Accounting Review (AMAR)* 3, no. 2 (2023): 90–106. <https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440>.
- Sekretariat Republik Indonesia. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (2021).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (2013).
- Silvia, Rina, Intiyas Utami, and Usil Sis Suchahyo. “Strategi Pemitigasian Bias Pengukuran Umum Dalam Evaluasi Balanced Scorecard Dengan Balikan Eksplanatori Rina.” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20, no. 2 (2016): 69–84. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art1>.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Statistik, Badan Pusat. “Profil Kemiskinan Di Banyuwangi.” Badan Pusat Statistik

- Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi, 2025.
<https://banyuwangikab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/10/01/247/profil-kemiskinan-di-banyuwangi-maret-2025.html>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syarifuddin, and Trimulato. “Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia.” *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2024): 83–99. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v8i2.4405>.
- Tambunan, Luna Theresia. “Fungsi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pelaporan Keuangan Padabadan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 4, no. 1 (2020): 1–15.
- Wahyuni, Asri. “Pengembangan Sistem Informasi Penerima Bantuan Sosial Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Efisiensi Distribusi.” *Jurnal Sistem Komputer (SISKOM)*, no. Vol. 2 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.35870/siskom.v2i2.787>.
- Wahyuni, and Fadly Yashari Soumena. “Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Syariah; Studi Pada Lembaga Keuangan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2023): 112–22. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.6.1.1234>.
- Wilmar Ervanni, Octaviar, Dwi Aulia, Heti Nubila, Jordi Hairul Rafli, and Choiriyah. “Peran Akutansi Syariah Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Di Bank Syariah Octaviar.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025): 31–42.
- Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): h.18. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/hasina/article/view/1395>.
- Zamzami, F, N D Nusa, I A Faiz, and U G M Press. *Sistem Informasi Akuntansi*. UGM PRESS, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=tTMXEAAAQBAJ>.
- Zuhrotin Nasyi'ah, Eny, Iwan Triyuwono, Ali Djamhuri, and Abdul Gofar. “A Critical Review Of Accountability From The Islamic Perspective: Phenomena, Position, And Alignment Of Methodology.” *The International Journal of Accounting and Business Society* 30, no. 2 (2022).

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) dan Implikasinya terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi	a. Implementasi Sistem Elektronik E-Bansos b. Transparansi penyaluran dana bantuan sosial. c. Akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial	a. Proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial. b. Penggunaan sistem elektronik (SIKS-NG, PERLINSOS, dan IKD) c. Mekanisme login dan akses data dalam sistem d. Proses pencatatan dan pemutakhiran data penerima bantuan e. Hambatan teknis dalam implementasi sistem E-Bansos f. Keterbukaan informasi penyaluran bantuan sosial g. Keterlacakan data dan dokumentasi penyaluran bantuan sosial	Data Primer (Informan): a. Pendamping Bantuan Sosial (Pendamping E-Bansos) Kabupaten Banyuwangi b. Penerima Bantuan Sosial (PKH dan BPNT) Data Sekunder: a. Dokumentasi penyaluran bantuan sosial b. Dokumen dan laporan sistem SIKS-NG dan PERLINSO c. Buku dan jurnal yang relevan d. Website resmi Dinas Sosial dan Kementerian	1. Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 2. Teknik peengumpulan data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Keabsahan data a. Triangulasi sumber b. Triangulasi teknik c. Triangulasi waktu	a. Analisis Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) dalam penyaluran dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi b. Implikasi implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) terhadap transparansi penyaluran dana bantuan sosial c. Implikasi implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) terhadap akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial

		h. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial	Sosial		
--	--	--	--------	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Abdul Aziz

NIM : 222105030013

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Isntitusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.. apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur - unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai aturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Februari 2026

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

METERAI
TEMPEL
F9AC1ANX282631230

M. Abdul Aziz

NIM : 222105030013

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi

Tanggal : 13 November 2025

Subjeck : Wawancara Profil dan Tata Kelola Dinas Sosial Banyuwangi

Pertanyaan :

1. Bagaimana gambaran umum peran Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial?
2. Apa visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial?
3. Apa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam penyaluran bantuan sosial?
4. Bagaimana struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung pengelolaan bantuan sosial?
5. Program bantuan sosial apa saja yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?
6. Bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?

Informan : Pendamping E - Bansos tingkat kabupaten banyuwangi

Tanggal : 19 November 2025

Subjeck : Implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos)

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses implementasi Sistem Elektronik Bansos (E-Bansos) di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?

2. Aplikasi apa saja yang digunakan dalam pengelolaan bantuan sosial di instansi ini?
3. Bagaimana peran aplikasi SIKS-NG dalam proses pendataan penerima bantuan sosial?
4. Bagaimana mekanisme pembaruan atau perubahan data penerima manfaat dalam sistem tersebut?
5. Bagaimana penggunaan aplikasi PERLINSOS dalam proses pelayanan kepada penerima bantuan sosial?
6. Bagaimana tahapan verifikasi identitas penerima bantuan sosial melalui sistem tersebut?
7. Bagaimana sistem elektronik membantu petugas dalam mengelola dan menampilkan data penerima bantuan sosial?
8. Apakah penggunaan sistem elektronik bansos membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pelayanan bantuan sosial?
9. Apa hambatan / kendala dari ke dua aplikasi tersebut?

Informan : Pendamping E - Bansos tingkat kabupaten banyuwangi

Tanggal : 28 November 2025

Subjeck : Implikasi Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran

Bantuan Sosial

Pertanyaan :

1. Bagaimana penggunaan sistem elektronik bansos membantu meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial?
2. Apakah data penerima bantuan sosial yang tersimpan dalam sistem dapat ditelusuri kembali oleh petugas?
3. Bagaimana sistem membantu memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial?
4. Bagaimana sistem elektronik mendukung pencatatan dan pelaporan penggunaan dana bantuan sosial?

5. Apakah setiap proses pelayanan bantuan sosial tercatat dalam sistem sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif?
6. Bagaimana sistem tersebut membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi?
7. Apakah terdapat mekanisme pengawasan atau evaluasi dalam penggunaan sistem elektronik bansos?

Informan : Penerima Bantuan Sosial

Tanggal : 5 – 9 Desember 2025

Subjek : Proses Verifikasi Penerima Manfaat

Pertanyaan :

1. Bagaimana proses Anda terdaftar sebagai penerima bantuan sosial?
2. Apakah petugas melakukan pengecekan identitas atau data sebelum bantuan diberikan?
3. Bagaimana pengalaman Anda dalam proses penerimaan bantuan sosial tersebut?
4. Apakah bantuan sosial yang Anda terima sudah sesuai dengan kebutuhan Anda?
5. Menurut Anda, apakah proses penyaluran bantuan sosial sudah berjalan dengan baik?
6. Apakah Anda pernah mengalami kendala dalam proses penerimaan bantuan sosial?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA

Jember, 28 Oktober 2025
Nomor : 460/373/429.109/2026
Telepon (0333) 424506, Faksimile (0333) 424506,
Email: dinsospkbbanyuwangi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Kepada Yth. Nomor : 460/373/429.109/2026

Kepala DINSOSPPKB Kab. Banyuwangi

Jl. HOS Cokroaminoto No.30

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa :
Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :
NIM : 222105030013
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam
Nama Prodi : Akuntansi Syariah
NIM : 222105030013

Semester VIII (Delapan) dengan ini menyatakan bahwa nama mahasiswa tersebut diatas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi dengan Judul "Analisis Sistem Elektronik Bansos (E - Bansos) Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi".

Guna melakukan Penelitian/Riset Mengenai "Analisis Sistem Elektronik Bansos (E - Bansos) Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Banyuwangi" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUWANGI
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Widyawati-Islami Rahayu

HENIK SETYORINI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751111 199412 2 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Elektronik (BPEL)



CS Dipindai dengan CamScanner

CS Dipindai dengan CamScanner

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

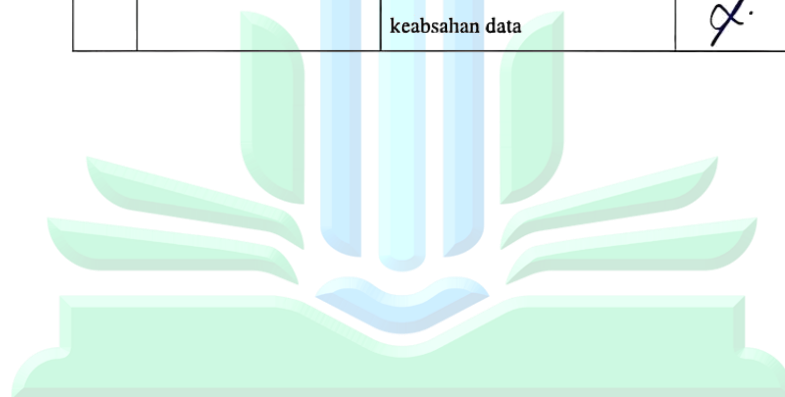
Nama : M. Abdul Aziz

Nim : 222105030013

Judul : Analisis Sistem Elektornik Bansos (E – Bansos) Dalam Penyaluran Dana
Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Banyuwangi

Lokasi : DINSOSPPKB

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Selasa, 4 November 2025	Penyerahan Surat Izin Permohonan Penelitian	
2	Kamis, 13 november 2025	Wawancara Profil Dinas Sosial	
3	Rabu, 19 November 2025	Wawancara Implementasi Sistem E - Bansos	
4	Jum'at, 28 November 2025	Wawancara hambatan dan siklus aplikasi E - Bansos	
5	Jum'at, 23 Januari 2025	Mengevaluasi dan Memastikan keabsahan data	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Pendamping E – Bansos Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial



Wawancara dengan Penerima Manfaat BPNT



Wawancara dengan penerima manfaat PKH



Registrasi Akun PERLINSOS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : M. Abdul Aziz
NIM : 222105030013
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Sistem Elektronik Bansos (E – Bansos) Dalam Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial Banyuwangi

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2026
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, M.E.I.
197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: <http://febl.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 14 /Un.22/D.5.KP.2/KM.05.00/01/2026

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Akuntansi Syariah,
menerangkan bahwa :

Nama : M. Abdul Aziz
NIM : 222105030013
Semester : VIII (Delapan)



Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai
bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan
diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Januari 2026

A.n. Dekan
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.
NIP. 198803012018012001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487650
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinckhas.ac.id Website: <http://febi.uinckhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M. Abdul Aziz
NIM : 222105030013
Program Studi/Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Blodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 2 Februari 2026
Pembimbing


Dr. Hersa Farida Goriani, M.E.I
NIP. 198611292018012001



BIODATA PRIBADI



Data Pribadi

Nama : M. Abdul Aziz
Nim : 222105030013
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 23 Juni 2004
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmada
Siddiq Jember
No. Hp : 085755534017

Riwayat Pendidikan

MI Al – Hikmah Sragi (2010 – 2016)
Mts Al – Fatah Sragi (2016 – 2019)
MAN 2 Banyuwangi (2019 - 2022)
UIN KHAS Jember (2022 – Sekarang)